



**BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 39 TAHUN 2019**

TENTANG

**RENCANA INDUK SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2019-2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan suatu layanan publik yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang perlu ditetapkan suatu strategi pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi dalam berbagai aspek layanan publik yang dikenal dengan e- Government;
 - b. bahwa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis elektronik perlu ditetapkan strategi, pedoman dan peta jalan;
 - c. bahwa dalam mewujudkan investasi teknologi informasi dan komunikasi yang tepat efektif dan efisien perlu ditetapkan strategi, pedoman dan peta jalan;
 - d. bahwa dalam peningkatan sumber daya manusia bidang teknologi informasi dan komunikasi perlu ditetapkan strategi, pedoman dan peta jalan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Karawang Tahun 2019-2021.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/M.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional.
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Pengamanan Informasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2019-2021.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Karawang;
4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
5. Tehnologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/ atau menyebarkan informasi.
6. Teknologi, Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut TIK adalah penggunaan teknologi komputer yang meliputi hardware, software, dan jaringan serta terjadinya sinkronisasi integrasi telekomunikasi (saluran telepon dan sinyal nirkabel), komputer serta perangkat lunak perusahaan yang diperlukan, middleware, penyimpanan, dan audio visual sistem, yang memungkinkan pengguna untuk mengakses, menyimpan mengirimkan dan memanipulasi informasi.
7. Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik mengetik, optik, atau system yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan.
8. Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Rencana Induk SPBE adalah Dokumen Perencana Pengembangan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) di Kabupaten Karawang yang berjangka waktu 3 tahun (2019-2021) yang menjadi acuan resmi dalam pengembangan dan penerapan Teknologi, Informasi dan Komunikasi pada pemerintah Kabupaten Karawang.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Penyusunan Rencana Induk SPBE ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan acuan dalam kegiatan perencanaan dan pengembangan TIK bagi Perangkat Daerah yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kabupaten Karawang.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Penyusunan Rencana Induk SPBE ini bertujuan untuk :

- a. Mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang efektif dan efisien;
- b. Mewujudkan rancangan dalam integrasi dan interoperabilitas data dan sistem informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang;
- c. Memberikan arahan dalam menentukan strategi TIK (Perangkat Keras, Perangkat Lunak, Jaringan Komputer dan Sumber Daya Manusia TIK);
- d. Memberikan acuan dalam menentukan prioritas dan penyusunan anggaran kegiatan TIK serta mencegah terjadinya duplikasi kegiatan TIK maupun kegiatan TIK yang tidak sesuai dengan kebutuhan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Rencana Induk SPBE ini meliputi :

- a. analisis tingkat kematangan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang yang akan menjadi landasan awal untuk langkah pembangunan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi;
- b. arahan strategis teknologi informasi yang menjelaskan kontribusi TIK terhadap pencapaian visi, misi, sasaran Pemerintah Kabupaten Karawang dalam konteks pengembangan Government to Citizen, Government to Bussiness, dan Government to Government;

- 4
- c. tata kelola TIK yang menggambarkan mengenai struktur organisasi TIK dan kerangka kebijakan Pemerintah Kabupaten Karawang untuk penentuan kebijakan, penentuan prioritas dan alokasi sumber daya untuk penerapan TIK berdasarkan faktor penentu kesuksesan pada *people, process, technology*, di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang;
 - d. penentuan prinsip-prinsip teknologi informasi dan komunikasi dalam mewujudkan arsitektur dan tata kelola TI yang efektif dan efisien.
 - e. arsitektur teknologi yang terdiri atas perangkat keras, perangkat lunak, jaringan dan infrastruktur yang dibutuhkan dalam implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam mewujudkan Karawang Smart City ;
 - f. arsitektur aplikasi dan sistem informasi bagi layanan publik dan layanan internal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang yang sesuai dengan kebutuhan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan manajemen birokrasi;
 - g. menyusun rencana transisi untuk menyalurkan perubahan yang dibutuhkan dan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kabupaten Karawang.

Pasal 5

- (1) Rencana Induk SPBE Kabupaten Karawang Tahun 2019-2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN;

BAB II : PENDEKATAN DAN METODOLOGI;

BAB III : PROFIL PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG;

BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN SPBE;

BAB V : ARAH STRATEGI SPBE;

BAB VI : ANALISIS KONDISI SAAT INI;

BAB VII : KONDISI YANG DIHARAPKAN;

BAB VIII : PETA RENCANA SPBE;

BAB IX : PENUTUP.

- (2) Rincian Rencana Induk SPBE Kabupaten Karawang Tahun 2019-2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **30 Oktober 2019**

BUPATI KARAWANG,



CELLICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **30 Oktober 2019**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2019
NOMOR **39** .

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KARAWANG

NOMOR 39 TAHUN 2019

TENTANG RENCANA INDUK SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN
2019-2021

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pengembangan Teknologi Informasi (TI) di Indonesia sudah sedemikian pesat. Namun, posisi Indonesia secara umum dalam ICT Development Index yang dikeluarkan oleh ITU adalah ranking 115 selama 2 tahun berturut-turut, yaitu pada tahun 2015 dan 2016. Untuk kawasan ASEAN, Indonesia berada di peringkat ke-7 di bawah Singapura (20), Malaysia (61), Brunei Darussalam (77), Thailand (82), Vietnam (102), dan Filipina (107). Hal ini menandakan bahwa pengembangan TI masih perlu terus ditingkatkan. Pengembangan TI di sektor pemerintah melalui program E-Government juga mengalami kemajuan yang sangat pesat walaupun jika dilihat dari ranking E-Government Development Index, Indonesia mengalami penurunan yaitu dari ranking 106 pada tahun 2014 menjadi 116 pada tahun 2016 dari total 193 negara di dunia. Penilaian E-Government Development Index didasarkan pada tiga sub kriteria, yaitu Online Service Index, Telecommunication Infrastructure Index, dan Human Capital Index. Pemerataan perkembangan TI, khususnya E-Government ini yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi seluruh jajaran pemerintah, baik Pusat maupun Daerah.

Kemampuan setiap daerah dalam mengembangkan, memanfaatkan dan menerapkan TI menjadi kunci keberhasilan pembangunan E-Government. Pengembangan inovasi daerah yang sistematis akan mengarah pada knowledge economy dan knowledge society. Inisiatif pemerintah dalam hal pengembangan E-Government ini dimulai dengan disahkannya Instruksi Presiden nomor 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government. Hal ini menunjukkan bahwa sudah lebih dari 1 dasawarsa Pemerintah sangat serius menyiapkan, mengembangkan dan menyelenggarakan E-Government.

Terlebih lagi dengan ditandatanganinya Peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, diharapkan mampu mendorong percepatan implementasi E-Government di Indonesia. SPBE dilaksanakan dengan prinsip efektivitas, keterpaduan, kesinambungan, efisiensi, akuntabilitas, interoperabilitas, dan keamanan. Selaras dengan hal tersebut, rencana pembangunan Pemerintah Kabupaten Karawang juga ditekankan pada peran TI dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karawang selaku aktor transformasi E-Government di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang mempunyai peran inti untuk mengembangkan dan menyelenggarakan pemerintahan berbasis elektronik secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan jejaring komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi antar lintas instansi, dan seluruh elemen masyarakat. Namun, tentu saja banyak tantangan dan sekaligus peluang yang dihadapi khususnya dalam rangka pengembangan pelayanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.

Dalam menghadapi tantangan dan peluang yang ada, khususnya dalam rangka pengembangan E-Government, Pemerintah Kabupaten Karawang butuh acuan dalam bentuk Rencana Induk SPBE Pemerintah Kabupaten Karawang selama tiga tahun (2019-2021). Rencana Induk SPBE ini akan menjadi arah kebijakan, sasaran, dan kegiatan terkait pengembangan dan implementasi SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.

2. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- d. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
- h. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- i. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Strategi dan Kebijakan Nasional Pengembangan E-Government
- j. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 57 tahun 2003 tentang Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan E-Government Lembaga
- k. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41 Tahun 2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional
- l. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi
- m. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika
- n. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karawang 2005-2025

o. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karawang 2016-2021

3. Maksud, Tujuan dan Sasaran

a. Maksud

Penyusunan Rencana Induk SPBE Pemerintah Kabupaten Karawang 2019-2021 ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan acuan dalam kegiatan perencanaan dan pengembangan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.

b. Tujuan

Penyusunan Rencana Induk SPBE Pemerintah Kabupaten Karawang 2019-2021 mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Menetapkan standar SPBE yang akan diimplementasikan
2. Meningkatkan sinergitas antara pengguna dan pengelola SPBE
3. Mengintegrasikan data dan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang
4. Memastikan investasi SPBE efektif dan efisien
5. Menentukan prioritas investasi SPBE
6. Menjadi landasan penyusunan anggaran investasi SPBE
7. Menynergikan seluruh layanan SPBE

c. Sasaran

Sasaran yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Menghasilkan panduan pemanfaatan SPBE yang menyeluruh, sistematis dan terpadu serta realistis mengedepankan dan mengaitkan aspek bisnis (layanan publik) dan aspek TI.
2. Arah kebijakan dan strategi perencanaan, pemanfaatan dan pengembangan E-Government lebih terarah dan berkesinambungan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Karawang sehingga lebih transparan dan akuntabel

4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penyusunan Rencana Induk SPBE Pemerintah Kabupaten Karawang 2019-2021 meliputi:

1. Pendekatan dan Metodologi
2. Tentang Pemerintah Kabupaten Karawang
3. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran SPBE
4. Arah Strategi SPBE
5. Analisis Kondisi Saat Ini
6. Kondisi yang Diharapkan
7. Peta Rencana SPBE

BAB II PENDEKATAN DAN METODOLOGI

Dalam bab ini menjelaskan mengenai pendekatan dan metodologi yang dipakai selama proses penyusunan Rencana Induk SPBE Pemerintah Kabupaten Karawang 2019-2021.

A. Pelaksanaan Pekerjaan

1. Pendekatan Penilaian Kondisi Saat Ini

a. Analisis Kegiatan Utama dan Pendukung dengan Value Chain Analysis

Value Chain digunakan untuk memahami rantai nilai untuk membentuk suatu produk atau layanan. Value Chain dibagi menjadi Sembilan aktifitas yang dikelompokkan menjadi dua aktifitas utama dan aktifitas pendukung, seperti pada gambar dibawah ini.



Gambar 1. Value Chain

Aktivitas utama:

1. Inbound Logistics

Aktivitas atau kegiatan yang dihubungkan dengan penerimaan, penyimpanan dan penyebaran input/bahan baku.

2. Operations

Kegiatan yang dihubungkan dengan mengubah input atau bahan baku menjadi bentuk produk akhir.

3. Outbound Logistics

Kegiatan yang diasosiasikan dengan pengumpulan, penyimpanan dan distribusi produk atau jasa ke pelanggan.

4. Marketing and Sales

Kegiatan dalam menarik pelanggan untuk kembali menggunakan produk atau jasa.

5. Service

Kegiatan yang diasosiasikan dengan penyediaan layanan untuk meningkatkan dan mempertahankan nilai produk atau jasa.

Aktivitas pendukung:

1. Procurement

Mengacu pada fungsi pembelian seperti pembelian bahan mentah, persediaan dan jenis jenis barang lainnya yang dapat dijadikan aset.

2. Technology Development

Kegiatan yang dapat dikelompokkan ke dalam usaha untuk meningkatkan produk dan proses. Pengembangan teknologi sangat penting untuk keunggulan kompetitif dalam semua industri.

3. Firm Infrastructure

Aktivitas infrastruktur perusahaan terdiri dari sejumlah aktivitas termasuk pengelolaan umum, perencanaan, keuangan, akuntansi dan manajemen kualitas.

4. Human Resource Management

Pengelolaan sumberdaya manusia meliputi kegiatan rekrutmen, pelatihan, pengembangan SDM.

B. Analisis Kondisi Organisasi dengan SWOT Analysis

SWOT Analysis merupakan suatu model penilaian atau assessment terhadap hasil identifikasi situasi untuk menentukan suatu kondisi yang bisa dikategorikan menjadi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman.

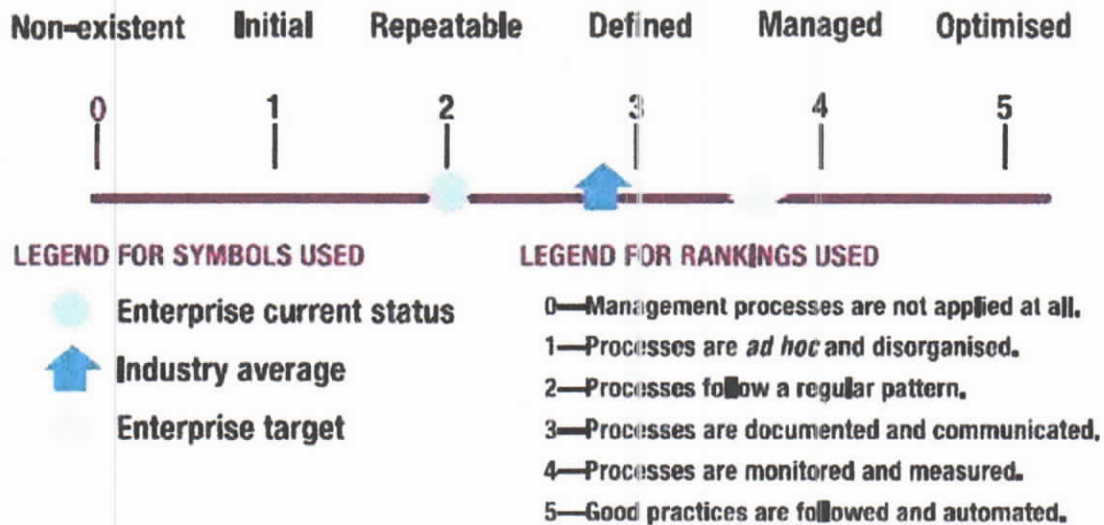


Gambar 2. SWOT Analysis

1. Strength / Kekuatan → situasi atau kondisi yang merupakan kekuatan dari organisasi atau program pada saat ini.
2. Weakness / Kelemahan → situasi atau kondisi yang merupakan kelemahan dari organisasi atau program pada saat ini.
3. Opportunity / Peluang → situasi atau kondisi yang merupakan peluang di luar organisasi dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi di masa depan.
4. Threat / Ancaman → situasi atau kondisi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi dan dapat mengancam eksistensi organisasi di masa depan.

C. Analisis Kematangan TI dengan COBIT 4.1

Model kematangan (maturity model) digunakan sebagai alat untuk melakukan benchmarking dan self-assessment oleh manajemen TI secara lebih efisien. Tingkat kematangan pemanfaatan TI memiliki perbedaan dalam setiap level. Tingkat kematangan dalam COBIT dibedakan menjadi 6 level yaitu non-existent, initial, repeatable, defined, managed, dan optimised. Dalam COBIT tiap level ini disebut dengan skala tingkat kematangan.



Gambar 3. Skala Tingkat Kematangan COBIT 4.1

Agar mencapai tingkat kematangan sesuai dengan tingkat kematangan pemanfaatan TI sesuai dengan framework COBIT maka organisasi harus melakukan beberapa hal yaitu:

- Membangun cara pandang dengan melakukan diskusi dalam sebuah workshop dan membandingkan dengan model contoh untuk melihat tingkat kematangan pemanfaatan TI yang baik.
- Menentukan tujuan pembangunan yang akan datang dengan memperhatikan tingkat deskripsi model lebih tinggi dalam pengukuran dan membandingkan best practices.
- Membuat rencana untuk mencapai tujuan dengan memberikan pendefinisian dari perubahan yang dibutuhkan dalam meningkatkan manajemen.

Prioritas sebuah proyek dengan melakukan identifikasi dimana dampak terbaik yang dibuat dan bagianmana yang lebih mudah untuk di implementasi.

2. Pendekatan Tata Kelola SPBE

Tata Kelola SPBE digunakan untuk memastikan bahwa tujuan organisasi dapat dicapai dengan melakukan evaluasi terhadap kebutuhan, kondisi, dan pilihan stakeholder, menerapkan arah melalui prioritas dan pengambilan keputusan terhadap arah dan tujuan yang telah disepakati. Tata kelola SPBE adalah upaya menjamin pengelolaan teknologi informasi agar mendukung bahkan selaras dengan strategi bisnis suatu enterprise yang dilakukan oleh dewan direksi, manajemen eksekutif dan juga oleh manajemen teknologi informasi. Terdapat kerangka kerja yang dapat membantu dalam membuat tata kelola SPBE pada organisasi, salah satunya dengan menggunakan COBIT

(Control Objectives for Information and Related Technology). Dengan mengacu pada framework COBIT, suatu organisasi diharapkan mampu menerapkan IT governance dalam pencapaian tujuannya. IT governance mengintegrasikan cara optimal dari proses perencanaan dan pengorganisasian, pengimplementasian, dukungan serta proses pemantauan kinerja TI.

COBIT 5 merupakan sebuah versi pembaharuan yang menyatukan cara berpikir yang mutakhir di dalam teknik-teknik dan tata kelola TI perusahaan. Menyediakan prinsip-prinsip, praktek-praktek, alat-alat analisis yang telah diterima secara umum untuk meningkatkan kepercayaan dan nilai sistem-sistem informasi. COBIT 5 dibangun berdasarkan pengembangan dari COBIT 4.1 dengan mengintegrasikan Val IT dan Risk IT dari ISACA, ITIL, dan standar-standar yang relevan dari ISO.

COBIT 5 menyatukan lima prinsip yang memungkinkan perusahaan membangun framework tata kelola dan manajemen efektif berdasarkan satu set tujuh enabler holistik, yang mengoptimalkan investasi dan penggunaan teknologi dan informasi untuk kepentingan stakeholder.

Selain itu, COBIT 5 juga menyediakan measurement, indikator, proses, dan best practice kepada para manajer, auditor dan pengguna TI agar mengoptimalkan manfaat penggunaan Teknologi Informasi dan mengembangkan IT governance dan kontrol di dalam perusahaan.

COBIT 5 memiliki Prinsip dan Enabler yang bersifat umum dan bermanfaat untuk semua ukuran perusahaan, baik komersial maupun non-profit ataupun sektor publik.



Gambar 4. COBIT 5

Keterangan:

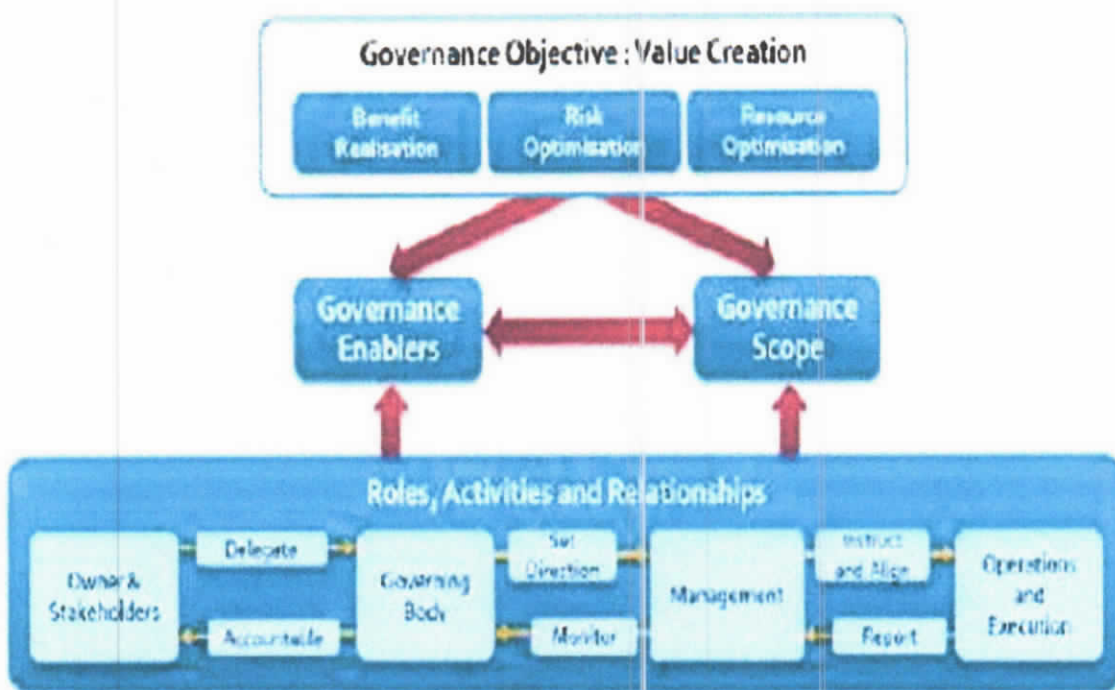
1. Meeting stakeholder needs

Berguna untuk pendefinisian prioritas untuk implementasi, perbaikan, dan jaminan. Kebutuhan stakeholder diterjemahkan ke dalam Goals Cascade menjadi tujuan yang lebih spesifik, dapat ditindaklanjuti dan disesuaikan,

dalam konteks: Tujuan perusahaan (*Enterprise Goal*), Tujuan yang terkait IT (*IT-related Goal*), Tujuan yang akan dicapai enabler (*Enabler Goal*). Selain itu, sistem tata kelola harus mempertimbangkan seluruh stakeholder ketika membuat keputusan mengenai penilaian manfaat, resource dan risiko.

2. Covering enterprise end-to-end

Bermanfaat untuk mengintegrasikan tata kelola TI perusahaan kedalam tata kelola perusahaan. Sistem tata kelola TI yang diusung COBIT 5 dapat menyatu dengan sistem tata kelola perusahaan dengan mulus.



Gambar 5. Covering enterprise end-to-end

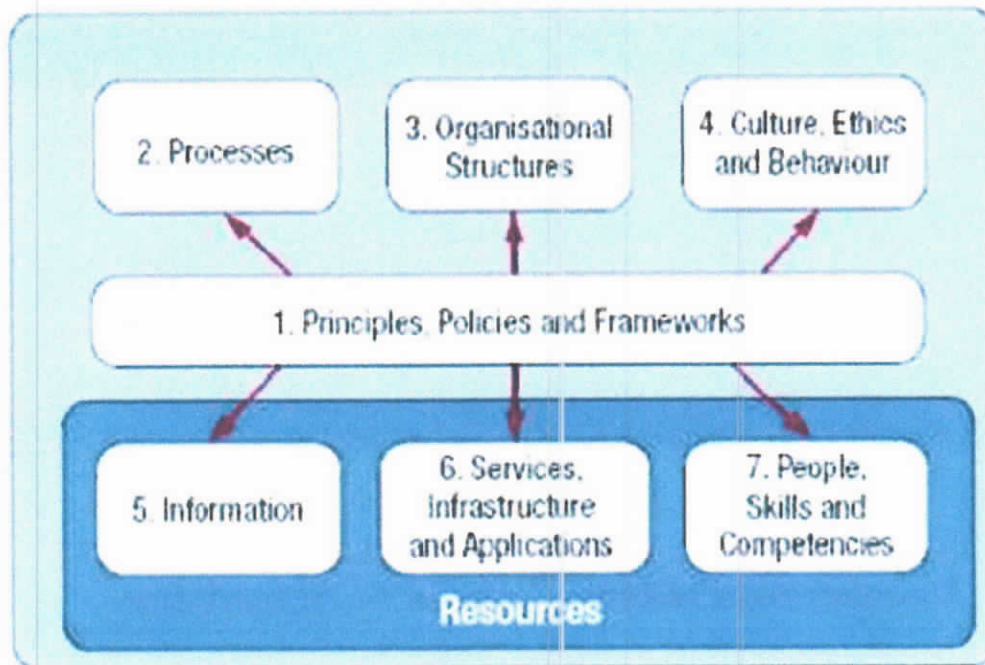
Prinsip ini juga meliputi semua fungsi dan proses yang dibutuhkan untuk mengatur dan mengelola TI perusahaan dimanapun informasi diproses. Dalam lingkup organisasi, COBIT 5 menangani semua layanan TI internal maupun eksternal, dan juga proses bisnis internal dan eksternal.

3. Applying a single integrated framework

Sebagai penyelarasan diri dengan standar dan framework relevan lain, sehingga perusahaan mampu menggunakan COBIT 5 sebagai framework tata kelola umum dan integrator. Selain itu prinsip ini menyatukan semua pengetahuan yang sebelumnya tersebar dalam berbagai framework ISACA (COBIT, VAL IT, Risk IT, BMIS, ITAF, dll).

4. Enabling a holistic approach

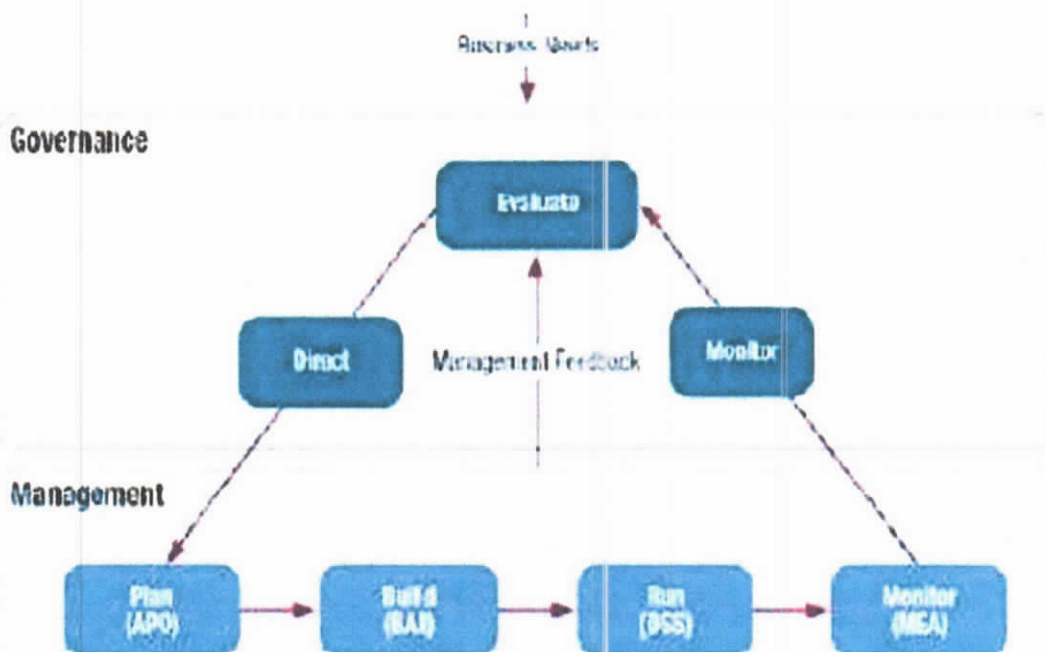
COBIT 5 memandang bahwa setiap enabler saling mempengaruhi satu sama lain dan menentukan apakah penerapan COBIT 5 akan berhasil.



Gambar 6. Enabling a holistic approach

5. Separating governance from management

COBIT membuat perbedaan yang cukup jelas antara tata kelola dan manajemen. Kedua hal tersebut mencakup berbagai kegiatan yang berbeda, memerlukan struktur organisasi yang berbeda, dan melayani untuk tujuan yang berbeda pula.



Gambar 7. Separating governance from management

3. Pendekatan Perencanaan Strategi SPBE

Perencanaan strategis SPBE merupakan proses identifikasi portofolio aplikasi SI berbasis komputer yang akan mendukung organisasi dalam pelaksanaan rencana bisnis dan merealisasikan tujuan bisnisnya. Perencanaan strategis SPBE mempelajari pengaruh TI terhadap kinerja bisnis dan kontribusi bagi organisasi dalam memilih langkah-langkah strategis. Selain itu, perencanaan strategis SPBE juga menjelaskan berbagai tools, teknik, dan kerangka kerja bagi manajemen untuk menyelaraskan strategi TI dengan strategi bisnis, bahkan mencari kesempatan baru melalui penerapan teknologi yang inovatif.

Beberapa karakteristik dari perencanaan strategis SPBE antara lain adalah adanya misi utama, yaitu keunggulan strategis atau kompetitif dan kaitannya dengan strategi bisnis; adanya arahan dari eksekutif atau manajemen senior dan pengguna; serta pendekatan utama berupa inovasi pengguna dan kombinasi pengembangan *bottom up* dan analisis *top down*.

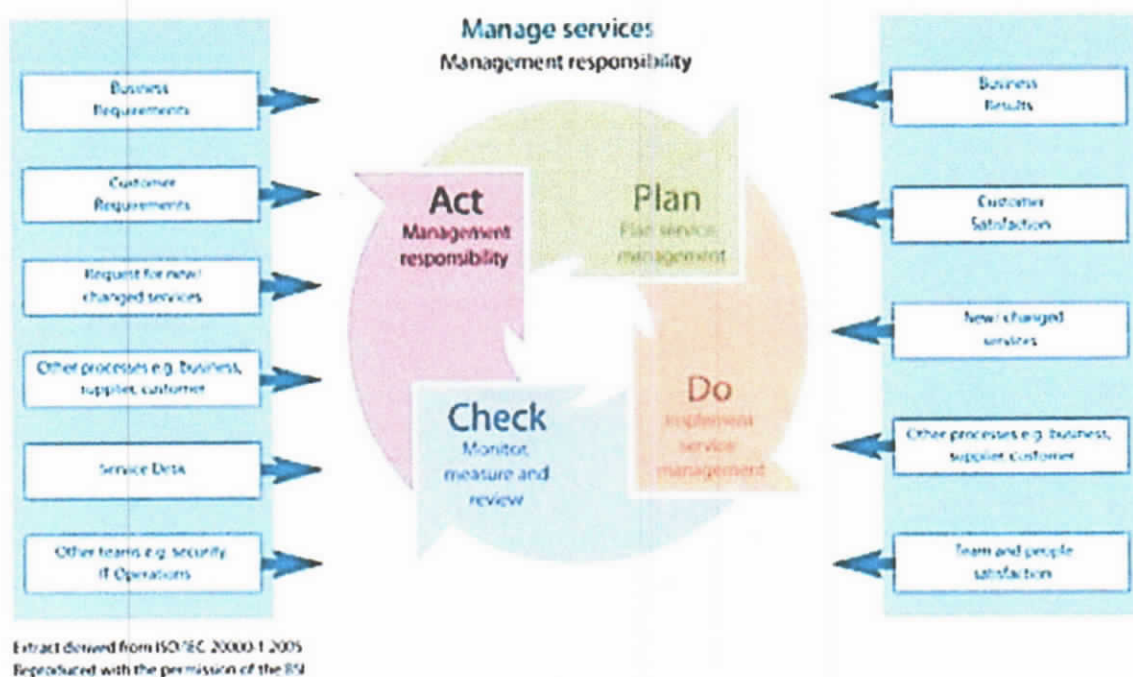
4. Pendekatan Pengelolaan Layanan SPBE

Implementasi manajemen layanan SPBE terkait dengan bagaimana layanan SPBE dirancang strateginya, didesain layanannya, ditransformasikan, dikelola, dan dikendalikan secara terencana, terarah, dan terukur. Siklus pengelolaan layanan SPBE ini dilaksanakan guna mencapai perbaikan secara berkesinambungan (*continuous improvement*).

Kerangka kerja yang dipergunakan dalam mengukur tingkat kematangan pengelolaan layanan SPBE ini adalah ISO/IEC 20000-1 Spesifikasi dan ISO/IEC 20000-2 Aturan Praktik. ISO/IEC 20000 adalah standar internasional pertama untuk manajemen layanan teknologi informasi (ITSM, IT Service Management). Standar ini didasari dan ditujukan untuk menggantikan British Standards BS 15000. Standar ini pertama kali dipublikasikan pada Desember 2005 dan seperti pendahulunya, BS 15000, awalnya dikembangkan untuk menggambarkan pedoman praktik terbaik yang terdapat dalam kerangka kerja ITIL (Information Technology Infrastructure Library) walaupun standar ini juga mendukung kerangka kerja dan pendekatan ITSM lainnya.

ISO/IEC 20000-1 Merupakan Standar Internasional mengenai Sistem Manajemen Layanan yang berfokus kepada IT Service Management. Dalam ISO/IEC 20000-1 menggunakan prinsip P-D-C-A (Plan-Do-Check-Act). ISO/IEC 20000-1 kompatibel dengan Sistem Manajemen keluaran ISO, ISO/IEC, ISO/TS, OHSAS, BS/PAS, TL. Standar ini Mendefinisikan 19 proses utama dalam Manajemen Layanan, yang mencakup:

1. Government (pengendalian)
2. Management (optimasi)



Gambar 8. Prinsip PDCA



Gambar 9. Service Management System

Manajemen layanan teknologi informasi dengan kerangka kerja ISO/IEC 20000 IT Service Management, dikembangkan berdasarkan best practices Information Technology Infrastructure Library (ITIL). ISO 20000 terdiri dari 10 bagian yaitu:

1. Scope;
2. Terms & Definitions;
3. Planning and Implementing Service Management;
4. Requirements for a Management System;
5. Planning & Implementing New or Changed Services;
6. Service Delivery Processes;
7. Relationship Processes;

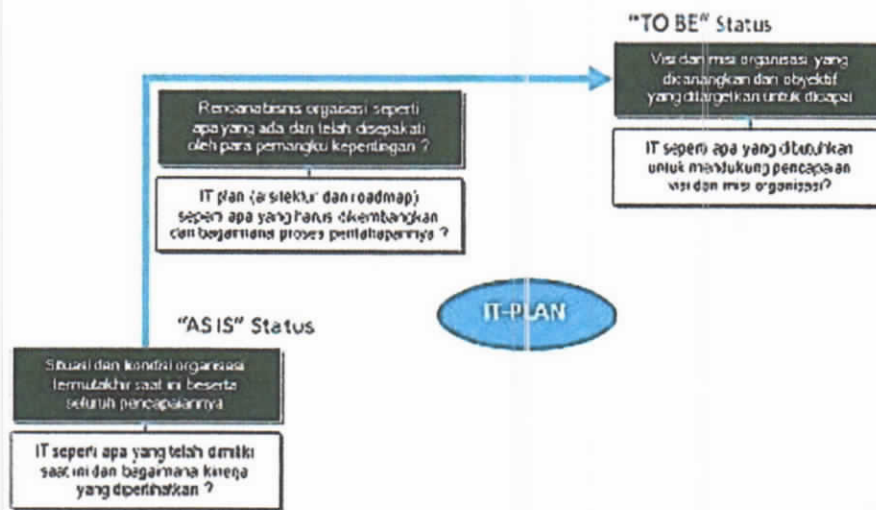
8. Control Processes;
9. Resolution Processes;
10. Release Process;

ISO/IEC 20000 terdiri dari dua bagian: satu spesifikasi untuk manajemen layanan TI dan satu aturan pelaksanaan untuk manajemen layanan. Bagian pertama, ISO 20000-1, menganjurkan penggunaan pendekatan proses terintegrasi untuk secara efektif menyediakan layanan terkelola sesuai kebutuhan bisnis dan pelanggan. Bagian kedua, ISO 20000-2, adalah suatu 'aturan pelaksanaan' dan menjelaskan praktik-praktik terbaik untuk manajemen layanan dalam lingkup ISO 20000-1.

5. Pendekatan Arah dan Inisiatif Strategi SPBE

Untuk pendetailan arah strategi SPBE ditentukan dengan mendefinisikan prinsip-prinsip perancangan SPBE. Pada dasarnya perencanaan SPBE dibutuhkan guna menjembatani transisi antara kondisi yang diharapkan dengan kondisi yang dihadapi saat ini. Untuk itu, potret yang benar dan representatif mengenai kondisi saat ini mutlak diperlukan dalam proses perencanaan, sama pentingnya dengan rancangan arsitektur yang mampu mengakomodasi kebutuhan teknologi di masa depan.

Prinsip tersebut perlu digarisbawahi guna menekankan perlunya penilaian terhadap kondisi saat ini dan tidak semata-mata terjebak dalam idealisasi perencanaan yang pada akhirnya menghasilkan perencanaan yang tidak membumi. Hal ini menjadi prinsip dasar penting dalam melaksanakan pekerjaan ini.



Gambar 10. Prinsip Dasar TI

2. Metodologi

Untuk menyusun Rencana Induk SPBE Pemerintah Kabupaten Karawang 2019-2021, dirancang sebuah metodologi yang memadukan panduan, framework, dan standar yang ada maupun pengalaman best practice sehingga diharapkan Rencana Induk SPBE Pemerintah Kabupaten Karawang 2019-2021 ini benar-benar dapat dijadikan acuan oleh Pemerintah Kabupaten Karawang dalam mencapai visinya.

Metodologi penyusunan Rencana Induk SPBE Pemerintah Kabupaten Karawang 2019-2021 terdiri atas beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Identifikasi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi SPBE

Melakukan identifikasi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi pemanfaatan SPBE di Pemerintah Kabupaten Karawang, berdasarkan RPJPD – RPJMD Kabupaten Karawang. Identifikasi ini dilakukan untuk melihat arah ke depan dari Pemerintah Kabupaten Karawang, strategi dan target, dan mengetahui karakteristik kebutuhan informasi dari Pemerintah Kabupaten Karawang.

2. Arah Strategi SPBE

Melakukan analisis arah strategi SPBE dengan menentukan prinsip strategi SPBE yang akan digunakan dengan membedakan menjadi 6 (enam) prinsip, yaitu prinsip tata kelola SPBE, proses bisnis, data/informasi, aplikasi, infrastruktur dan SDM. Dalam tahapan ini juga akan dipetakan strategi yang akan dilakukan dengan domain rencana strategisnya serta prinsip-prinsip yang mendasarinya.

3. Analisis Kondisi Saat Ini

Melakukan penilaian atau assessment untuk mengetahui kondisi saat ini dengan melakukan beberapa kegiatan analisis menggunakan pendekatan-pendekatan seperti:

- a. Analisis kegiatan utama dan pendukung dengan Value Chain Analysis
- b. Analisis kondisi organisasi dengan SWOT Analysis
- c. Analisis kematangan TI dengan COBIT 4.1

Domain penilaian kondisi TI saat ini meliputi tata kelola SPBE (kebijakan dan kelembagaan), arsitektur proses bisnis, arsitektur sistem informasi (data dan aplikasi), arsitektur infrastruktur dan SDM.

4. Kondisi yang Diharapkan

Dari hasil identifikasi sebelumnya, maka akan disusun inisiatif perencanaan strategis SPBE untuk tata kelola SPBE, arsitektur proses bisnis, arsitektur sistem informasi, arsitektur infrastruktur dan SDM di Pemerintah Kabupaten Karawang untuk tahun 2019-2021.

5. Peta Rencana SPBE

Proses penyusunan Peta Rencana SPBE Pemerintah Kabupaten Karawang didasarkan pada tahapan-tahapan sebelumnya. Analisis kondisi SPBE saat ini harus menjadi dasar pertimbangan penyusunan Peta Rencana SPBE di masa yang akan datang. Peta Rencana SPBE menjadi dasar acuan penyelenggaraan dan pengelolaan layanan SPBE Pemerintah Kabupaten Karawang.

BAB III

PROFIL PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG

1. Visi

Visi Pemerintah Kabupaten Karawang yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karawang tahun 2016-2021 yaitu **“Karawang yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur”**.

Mandiri adalah sikap dan kondisi masyarakat yang produktif, inovatif, adaptif terhadap perkembangan iptek, mampu mengoptimalkan potensi daerah, dan menggali sumber-sumber pendapatan dengan tetap berpegang pada budaya dan kearifan lokal.

Maju adalah SDM Kabupaten Karawang yang telah mencapai kualitas yang tinggi dengan tingkat kemakmuran yang juga tinggi disertai sistem informasi dan kelembagaan politik dan hukum yang mantap.

Adil yaitu tidak ada pembatasan/diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antar individu, gender, maupun wilayah.

Makmur yaitu kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Karawang dapat terpenuhi sehingga memberikan makna dan arti penting bagi daerah-daerah lain.

2. Misi

Misi Pemerintah Kabupaten Karawang tahun 2016-2021 merupakan penjabaran Misi Tahap III RPJPD Kabupaten Karawang tahun 2005-2025, yaitu:

1. Mewujudkan Aparatur Pemerintah Daerah yang Bersih dan Berwibawa;
2. Mewujudkan Kabupaten Karawang yang Berdaya Saing;
3. Mewujudkan Masyarakat Demokratis Berlandaskan Hukum;
4. Mewujudkan Kabupaten Karawang yang Asri dan Lestari;
5. Membangun Kabupaten Karawang Melalui Penguatan Desa.

3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang, Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Karawang terdiri atas:

- a) Sekretariat Daerah
- b) Sekretariat DPRD

- c) Inspektorat
- d) Dinas Daerah
 - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
 - Dinas Kesehatan
 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
 - Dinas Perikanan
 - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - Dinas Sosial
 - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 - Dinas Pangan
 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - Dinas Perhubungan
 - Dinas Komunikasi dan Informatika
 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 - Dinas Pertanian
 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan
 - Satuan Polisi Pamong Praja
- e) Badan Daerah
 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 - Badan Pendapatan Daerah
 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
- f) Kecamatan-kecamatan

Berdasarkan Peraturan Bupati Karawang nomor 56 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karawang, Dinas Komunikasi dan Informatika lah yang berperan sebagai *leading sector* dalam penyusunan Rencana Induk SPBE Pemerintah Kabupaten Karawang tahun 2019-2021. Hal ini sesuai dengan salah satu fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karawang yaitu merumuskan kebijakan teknis dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang komunikasi dan informatika serta persandian dan keamanan informasi.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN SPBE

1. Visi SPBE

Visi SPBE Pemerintah Kabupaten Karawang pada dasarnya tidak terlepas dari visi Pemerintah Kabupaten Karawang, yaitu “Karawang yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur”. Penetapan Visi SPBE harus berlandaskan pada perundang-undangan dan peraturan serta ketentuan yang berlaku mengenai Pemerintahan Daerah antara lain:

- 1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
- 3) Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government.

Dengan adanya penetapan Visi SPBE hendaknya dalam kurun waktu jangka menengah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang yang melaksanakan urusan pemerintah konkuren yang menjadi kewenangan daerah baik yang sifatnya wajib atau pilihan hendaknya mampu mendukung pelaksanaan akselerasi Pembangunan Daerah yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karawang 2016-2021. Visi SPBE yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Karawang yaitu **“Terwujudnya Karawang Smart City yang Maju dan Terintegrasi”**.

2. Misi SPBE

Visi tersebut dijabarkan dalam 6 (enam) Misi SPBE, yaitu :

- 1) Menyelenggarakan Tata Kelola TI di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.
- 2) Mewujudkan infrastruktur TIK terpadu untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan layanan publik.
- 3) Mengembangkan sistem informasi terintegrasi yang sejalan dengan Visi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Karawang.
- 4) Meningkatkan kapasitas SDM aparatur sesuai kompetensi dan bidang tugasnya dengan menjadikan TIK sebagai pendukung utama.
- 5) Meningkatkan keterbukaan informasi publik.
- 6) Menyelenggarakan keamanan informasi bagi layanan publik dan layanan Pemerintah Kabupaten Karawang.

Visi dan Misi SPBE Pemerintah Kabupaten Karawang dalam capaiannya merujuk kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Hal tersebut merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Karawang dalam mewujudkan **Smart City** melalui penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik berbasis elektronik.

3. Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan SPBE

Visi	: Terwujudnya Karawang Smart City yang Maju dan Terintegrasi
Misi 1	: Menyelenggarakan Tata Kelola TI di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terselaraskannya antara teknologi informasi dengan arah dan strategi pemerintah dalam penerapan TI, serta memaksimalkan pemanfaatan TI	Terwujudnya penyelenggaraan tata kelola TI yang terintegrasi diseluruh stake holder Pemerintah Kabupaten Karawang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fokus pada pencapaian visi dan misi suatu organisasi yang selaras dengan tujuan bisnis organisasi 2. Fokus pada sumber daya dan infrastruktur dapat mencukupi pada penggunaannya yang optimal, berkaitan pada investasi yang optimal dari penggunaan TI 3. Identifikasi resiko-resiko yang ada serta bagaimana cara mengatasi dampak resiko tersebut 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan kelembagaan (SOTK) yang menunjang terhadap penyelenggaraan IT. 2. Adanya Produk Hukum yang menunjang terhadap pelaksanaan TI (Perda, Perbup, Kepbup, dan Perkadis) 3. Adanya Rencana Induk SPBE Pemerintah Kabupaten Karawang 4. Adanya Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Karawang 5. Adanya Peta Rencana SPBE Pemerintah Kabupaten Karawang

Misi 2 : Mewujudkan infrastruktur TIK terpadu untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan layanan publik

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
<p>Tersedianya infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam rangka pengembangan e government</p>	<p>Terwujudnya infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam menunjang pengembangan e government di Kabupaten Karawang</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan jumlah koneksi internet di seluruh Perangkat Daerah 2. Perluasan koneksi jaringan intra pemerintah antar Perangkat Daerah melalui WAN (Wide Area Network), Local Area Network (LAN) ataupun Intranet 3. Pengembangan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah 4. Peningkatan jumlah internet / wifi gratis untuk masyarakat di area publik 5. Pembangunan infrastruktur dan akses jaringan komunikasi data yang memadai 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya Ruang Server untuk melayani kebutuhan penyimpanan data terintegrasi antar perangkat daerah. 2. Tersedianya layanan internet yang terintegrasi untuk seluruh perangkat daerah dengan Pusat layanan berada di Diskominfo 3. Tersedianya sistem penghubung layanan dalam memudahkan integrasi data dan layanan SPBE 4. Pengelolaan Data dan Aplikasi yang terintegrasi satu pintu melalui Diskominfo 5. Pembangunan jaringan intra pemerintah antar perangkat daerah yang terintegrasi. 6. Perluasan jumlah titik internet gratis pada area publik di Kabupaten Karawang 7. Pembangunan Command Center sebagai pusat layanan informasi kepada masyarakat dan sebagai pusat komando pengambilan kebijakan pimpinan daerah dengan sumber dari informasi yang ada di command center

Misi 3 : Mengembangkan sistem informasi terintegrasi yang sejalan dengan Visi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Karawang

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
<p>Tersedianya Sistem Informasi yang terintegrasi mendukung tata laksana internal birokrasi guna menunjang kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi dalam upaya pencapaian tujuan organisasi dan peningkatan layanan publik secara optimal kepada masyarakat</p>	<p>Terselenggaranya peningkatan kinerja dan akuntabilitas pemerintah serta pelayanan publik kepada masyarakat secara optimal melalui sistem informasi yang terintegrasi antar perangkat daerah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan peraturan perundang-undangan dan kebijakan mengenai Pemanfaatan Sistem Informasi untuk Layanan Administrasi Pemerintahan dan Layanan Publik 2. Pengembangan Sistem Informasi Layanan Administrasi Pemerintahan dan Layanan Publik yang menyeluruh dan terintegrasi antar Perangkat Daerah. 3. Peningkatan pengelolaan data melalui Data Base Manajemen System (DBMS). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan kebijakan tentang Pemanfaatan Sistem Informasi Layanan Administrasi Pemerintahan dan Layanan Publik 2. Penyediaan Aplikasi Layanan Administrasi Pemerintahan yang terintegrasi disetiap perangkat daerah 3. Penyediaan Aplikasi Layanan Publik yang terintegrasi disetiap perangkat daerah guna mengoptimalkan layanan publik kepada masyarakat 4. Penerapan konsep System Pengelolaan Data Base (DBMS) yang terintegrasi antar perangkat daerah, sehingga setiap perangkat daerah dapat terintegrasi

		<p>4. Optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam upaya menunjang pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Karawang dimasa mendatang</p>	<p>5. Penerapan Media Sosial sebagai sarana untuk menampung segala pelaporan dari masyarakat serta sebagai sarana penyampaian informasi hasil pembangunan kepada masyarakat.</p> <p>6. Pemanfaatan Aplikasi Pengaduan sebagai salah satu sarana untuk menampung Pengaduan Masyarakat yang terintegrasi dengan Kemenpan RB</p>
--	--	--	---

Misi 4 : Meningkatkan kapasitas SDM aparatur sesuai kompetensi dan bidang tugasnya dengan menjadikan TIK sebagai pendukung utama

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
<p>Peningkatan efektivitas dan efisiensi kerja Aparatur Sipil Negara dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan, melalui Penerapan TIK dalam pencapaian kinerja</p>	<p>Terselenggaranya peningkatan kompetensi SDM Aparatur Sipil Negara (ASN) di Bidang TIK dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengikutsertakan ASN dalam kegiatan Diklat Teknis Aparatur 2. Peningkatan Kompetensi Teknis Aparatur ASN di Bidang TIK. 3. Peningkatan jenjang pendidikan ASN 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemusatan ASN Bidang TIK di Diskominfo guna lebih mengefektivkan kinerja. 2. Untuk mengatasi kekurangan SDM di Bidang TIK, dapat memanfaatkan Tenaga Ahli Bidang TIK dalam rangka transfer wawasan, pengetahuan dan keterampilan

Misi 5 : Meningkatkan keterbukaan informasi publik

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
<p>Peningkatan pengelolaan dan pelayanan informasi dilingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas</p>	<p>Tersedianya informasi-informasi layanan publik dari seluruh Badan Publik yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. SOTK OPD direvisi dengan memasukkan fungsi PPID/ pelayanan informasi kedalam tupoksi menjadi salah satu fungsi utama OPD. 2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) harus dilengkapi dengan aparat/ pejabat pelaksana fungsional seperti pranata komputer, humas dan arsiparis, sehingga layanan informasi publik menjadi profesional. 	<p>Perlu segera membentuk struktur organisasi yang permanen dalam pelaksanaan fungsi PPID dengan pola sentralisasi sehingga tercapai kesatuan koordinasi dan keseragaman pelayanan informasi, dan terjalinnya jaringan kerja sama perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang</p>

Misi 6 : Menyelenggarakan keamanan informasi bagi layanan publik dan layanan Pemerintah Kabupaten Karawang

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mewujudkan tata kelola dan manajemen keamanan informasi Pemerintah Daerah yang komprehensif, efektif dan efisien guna mendukung peningkatan keamanan informasi pemerintah daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya fungsi identifikasi dan deteksi di bidang keamanan informasi yang efektif dan efisien. 2. Terwujudnya fungsi proteksi di bidang keamanan informasi yang efektif dan efisien 3. Terwujudnya fungsi penanggulangan dan pemulihan di bidang keamanan informasi yang efektif efisien 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan dan penerapan fungsi identifikasi dan deteksi di bidang keamanan informasi 2. Pembangunan dan penerapan fungsi proteksi di bidang keamanan informasi 3. Pembangunan dan penerapan fungsi penanggulangan dan pemulihan di bidang keamanan informasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan kebijakan / peraturan, mengenai fungsi persandian untuk pengamanan informasi (perda/perbup/kepbup/perkadis) 2. Penyusunan SOP mengenai Persandian dan Keamanan Informasi 3. Peningkatan pemanfaatan sarana/prasarana persandian untuk pengamanan informasi; 4. Peningkatan SDM berkompotensi persandian/keamanan informasi;

BAB V
ARAH STRATEGI SPBE

Arah Strategi SPBE Pemerintah Kabupaten Karawang diterjemahkan ke dalam Prinsip-prinsip SPBE. Prinsip-prinsip SPBE merupakan panduan dalam mewujudkan arsitektur dan tata kelola SPBE yang baik. Prinsip-prinsip SPBE juga menjelaskan peranan penting SPBE untuk mewujudkan kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang yang lebih cepat, akurat, transparan serta andal dalam menjadikan informasi-informasi yang dibutuhkan pemangku kepentingan. Prinsip-prinsip ini terdiri atas Prinsip Tata Kelola SPBE, Prinsip Proses Bisnis, Prinsip Data dan Informasi, Prinsip Aplikasi, Prinsip Infrastruktur, dan Prinsip SDM.

B. Prinsip Tata Kelola SPBE

Nama	1. Tata Kelola SPBE yang baik
Pernyataan	Pemerintah Kabupaten Karawang harus menerapkan Tata kelola SPBE yang baik
Dasar Pertimbangan	Tata kelola SPBE yang baik bermanfaat untuk meningkatkan kualitas layanan SPBE.
Implikasi	<ul style="list-style-type: none"> • Memahami Tata Kelola SPBE dan menjalankannya sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. • Target kinerja layanan (<i>service performance</i>) harus tercapai secara jelas, dan dipantau secara berkala pencapaiannya, serta memiliki tindak lanjut yang jelas untuk peningkatannya. • Memiliki tahapan implementasi Tata Kelola SPBE yang jelas berdasarkan analisis kesenjangan terhadap Tata Kelola SPBE saat ini dan skala prioritas SPBE yang ingin dicapai.

Nama	2. Kepatuhan terhadap regulasi
Pernyataan	Proses pengelolaan SPBE pada Pemerintah Kabupaten Karawang harus memenuhi regulasi yang relevan.
Dasar Pertimbangan	Pemerintah Kabupaten Karawang harus mematuhi regulasi yang relevan untuk pengelolaan SPBE.
Implikasi	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Kabupaten Karawang harus memiliki kesadaran untuk mematuhi regulasi terkait dengan pengelolaan SPBE. • Konsekuensi terkait dengan pelanggaran terhadap regulasi harus dipahami secara jelas. • Pengelolaan TI harus dipantau, dianalisis, dan diperbaharui untuk memenuhi perubahan regulasi atau regulasi baru.

Nama	3. Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip pengelolaan SPBE
Pernyataan	Prinsip-prinsip pengelolaan SPBE ini wajib dipatuhi oleh seluruh tingkatan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.
Dasar Pertimbangan	Apabila seluruh tingkatan organisasi pada Pemerintah Kabupaten Karawang patuh terhadap prinsip ini, maka akan tersedia informasi berkualitas secara konsisten dan terukur untuk para pengambil keputusan.
Implikasi	Apabila prinsip pengelolaan SPBE ini tidak dipatuhi maka akan timbul ketidakkonsistenan yang berpotensi mengacaukan pengelolaan SPBE.

Nama	4. Keberhasilan penerapan SPBE merupakan kontribusi seluruh perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Karawang
Pernyataan	Seluruh perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Karawang wajib berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan strategis SPBE serta berperan aktif dalam pemanfaatan SPBE dalam mendukung pencapaian strategi bisnis.
Dasar Pertimbangan	Pengguna merupakan para pemangku kepentingan (<i>stakeholder</i>) yang memastikan bahwa strategi dan penerapan SPBE selaras dengan strategi dan prioritas bisnis, maka seluruh perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Karawang harus terlibat dan bertanggung jawab dalam keberhasilan penerapan SPBE.
Implikasi	<ul style="list-style-type: none"> • Bertanggung jawab untuk menyelaraskan penerapan SPBE dengan strategis bisnis dan skala prioritas bisnis. • Komitmen alokasi sumber daya dari pengguna dibutuhkan untuk dapat mengimplementasikan prinsip ini.

C. Prinsip Bisnis Organisasi

Nama	5. Keberlangsungan organisasi Pemerintah Kabupaten Karawang
Pernyataan	Seluruh organisasi pada Pemerintah Kabupaten Karawang bertanggung jawab untuk menjaga supaya kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Karawang dapat berjalan, walaupun terjadi gangguan atau bencana yang mempengaruhi SPBE.
Dasar Pertimbangan	Penerapan SPBE mendukung seluruh kegiatan operasional pada Pemerintah Kabupaten Karawang, untuk mendukung keberlangsungan bisnis Pemerintah Kabupaten Karawang maka harus mempertimbangkan keandalan sistem SPBE tersebut.
Implikasi	<ul style="list-style-type: none"> • Pengguna harus berpartisipasi di dalam pembuatan <i>Business Impact Analysis (BIA)</i>, untuk menentukan dampak apabila terjadi gangguan bencana. • Pembuatan dokumen <i>Disaster Recovery Center (DRC)</i> dan pembangunan DRC.

Nama	6. Berorientasi kepada layanan
Pernyataan	Arsitektur SPBE yang dikembangkan berorientasi kepada layanan.
Dasar Pertimbangan	Pemerintah Kabupaten Karawang akan menjadi <i>service provider</i> , baik untuk aplikasi maupun infrastruktur. Oleh karena itu, keseluruhan produk dan jasa akan dikemas dalam bentuk layanan SPBE.
Implikasi	Pemilihan dan penerapan aplikasi dan infrastruktur harus memiliki karakteristik dan kapabilitas sebagai layanan.

Nama	7. Keselarasan dengan RPJMD
Pernyataan	Rencana Induk SPBE Pemerintah Kabupaten Karawang harus selaras dengan strategi dan skala prioritas bisnis Pemerintah Kabupaten Karawang.
Dasar Pertimbangan	Pelaksanaan SPBE mempunyai acuan yang jelas dan mendukung berjalannya bisnis.
Implikasi	<ul style="list-style-type: none"> • Rencana Induk SPBE harus selaras dengan strategi dan skala prioritas Pemerintah Kabupaten Karawang. • Rencana Induk SPBE harus lengkap, yang setidaknya memiliki Arsitektur Proses Bisnis, Arsitektur Data dan Informasi, Arsitektur Aplikasi, Peta Rencana SPBE, dll. • Memastikan tersedianya anggaran dan sumber daya untuk mengimplementasikan rencana SPBE yang telah disetujui.

D. Prinsip Data dan Informasi

Nama	8. Data dan Informasi adalah aset
Pernyataan	Data dan informasi adalah aset yang bernilai bagi Pemerintah Kabupaten Karawang yang harus dikelola dengan baik.
Dasar Pertimbangan	Data dan informasi berfungsi sebagai penunjang dalam pengambilan keputusan.
Implikasi	Kebijakan dan prosedur pengelolaan data dan informasi harus dibuat untuk memastikan kualitas data, sehingga data dan informasi dapat digunakan untuk menunjang dalam pengambilan keputusan.

Nama	9. Data dan informasi digunakan bersama
Pernyataan	Pengguna harus memiliki akses terhadap data dan informasi yang dibutuhkan untuk melakukan tugasnya. Oleh karena itu, data dan informasi yang akurat dan tepat waktu sangat dibutuhkan untuk menjalankan setiap fungsi sesuai dengan tugasnya pada Pemerintah Kabupaten Karawang.
Dasar Pertimbangan	Akses data dan informasi yang akurat dan tepat waktu sangat penting untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan.
Implikasi	<ul style="list-style-type: none"> • Perlunya dibuat kebijakan, prosedur, dan standar untuk mengelola dan mengakses data. • Diperlukan metode dan alat bantu untuk mengelola penggunaan data dan informasi.
Nama	10. Kemudahan akses data dan informasi
Pernyataan	Data dan informasi harus mudah diakses oleh pengguna dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan yang berlaku.
Dasar Pertimbangan	Kemudahan akses data dan informasi akan membuat pengguna lebih efektif dan efisien dalam menjalankan tugasnya, termasuk dalam pengambilan keputusan.
Implikasi	<ul style="list-style-type: none"> • Akses kepada data dan informasi tidak diberikan hak untuk memodifikasi data • Akses kepada data dan informasi tidak memberikan pemahaman arti terhadap data dan informasi sehingga pengguna harus berhati-hati dalam mengartikannya agar tidak salah dalam mengartikan data.

Nama	11. Data dan informasi yang terlindungi dan aman
Pernyataan	Data dan informasi harus dijaga dari penggunaan yang tidak sah.
Dasar Pertimbangan	Untuk mencegah agar data dan informasi yang sensitif atau bersifat rahasia tidak diberikan kepada pihak yang tidak berwenang.
Implikasi	<ul style="list-style-type: none"> • Keterbukaan data dan informasi harus mengacu kepada Undang-undang yang berlaku. • Data dan informasi harus diklasifikasikan, misalnya menurut tingkat kerahasiaannya. • Kebijakan terkait masa retensi terhadap data dan informasi.

E. Prinsip Aplikasi

Nama	12. Aplikasi SPBE mendukung proses bisnis
Pernyataan	Implementasi aplikasi SPBE harus memenuhi seluruh kebutuhan proses bisnis yang ditentukan oleh pengguna.
Dasar Pertimbangan	Aplikasi berfungsi untuk mempermudah atau mendukung berjalannya suatu proses bisnis.
Implikasi	<ul style="list-style-type: none"> • Apabila ada perubahan suatu proses bisnis yang didukung oleh aplikasi SPBE, Surat Keputusan yang memberlakukan perubahan proses bisnis tersebut harus dikeluarkan setelah dukungan aplikasi SPBE telah siap. • Diperlukan arsitektur aplikasi yang mendukung proses bisnis pada Pemerintah Kabupaten Karawang.

Nama	13. Kemudahan penggunaan
Pernyataan	Aplikasi SPBE harus mudah digunakan. Kemudahan pengoperasian aplikasi harus diutamakan dibandingkan kemudahan pada saat implementasi.
Dasar Pertimbangan	Kemudahan dalam penggunaan aplikasi SPBE akan meningkatkan produktivitas kerja pengguna, sehingga dapat mendukung pekerjaan sehari-hari dan meminimalkan risiko aplikasi tersebut tidak digunakan oleh pengguna.
Implikasi	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu adanya pelatihan penggunaan aplikasi SPBE. • Persyaratan kemudahan penggunaan jangan sampai menjadi penghalang untuk berjalannya proses bisnis.
Nama	14. Tidak bergantung pada teknologi tertentu
Pernyataan	Aplikasi SPBE yang diimplementasikan harus tidak bergantung kepada teknologi yang spesifik (independen), oleh karena itu diutamakan aplikasi yang dapat dioperasikan di berbagai platform teknologi.
Dasar Pertimbangan	Aplikasi SPBE yang independen merupakan aplikasi yang dapat dibangun, diimplementasikan, dan diganti dengan versi baru (<i>upgrade</i>) dan harus dapat dioperasikan di berbagai platform teknologi. Ketergantungan akan teknologi yang spesifik mengakibatkan ketergantungan kepada vendor.
Implikasi	<ul style="list-style-type: none"> • Diperlukan arsitektur aplikasi yang mendukung proses bisnis pada Pemerintah Kabupaten Karawang. • Diperlukan arsitektur infrastruktur yang mendukung proses bisnis pada Pemerintah Kabupaten Karawang. • Diperlukan juga matriks yang dapat digunakan untuk memetakan arsitektur aplikasi dengan arsitektur infrastruktur.

Nama	15. Proteksi aplikasi pendukung bisnis
Pernyataan	Proteksi terhadap aplikasi pendukung bisnis yang penting untuk melindungi keberlangsungan bisnis Pemerintah Kabupaten Karawang.
Dasar Pertimbangan	Menjaga kegiatan utama Pemerintah Kabupaten Karawang yang memberikan kontribusi terbesar untuk kelangsungan bisnis dan dapat berjalan dengan meminimalkan risiko.
Implikasi	<ul style="list-style-type: none"> • Menentukan dan memprioritaskan sumber daya keamanan untuk melindungi aplikasi yang paling penting dalam keberlangsungan bisnis Pemerintah Kabupaten Karawang. • Berkontribusi dengan aktif saat pembuatan <i>Business Impact Analysis (BIA)</i>. • Mematuhi kebijakan, standar, dan prosedur yang merupakan tanggung jawab masing-masing organisasi terkait.

F. Prinsip Infrastruktur

Nama	16. Perubahan berbasis kebutuhan bisnis
Pernyataan	Perubahan teknologi diutamakan untuk merespons perubahan terhadap kebutuhan bisnis.
Dasar Pertimbangan	Hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa tujuan dari penerapan SPBE adalah untuk mendukung kegiatan bisnis. Namun perubahan teknologi dilakukan demi kebaikan atau peningkatan bisnis yang harus dapat diterima.
Implikasi	<ul style="list-style-type: none"> • Manajemen perubahan harus sejalan dengan prinsip ini. • Pengadaan infrastruktur diutamakan mengacu kepada kinerja yang dibutuhkan oleh pengguna. • Dalam perencanaan implementasi teknologi (<i>replace/upgrade</i>) harus ada <i>fall-back plan</i> yang andal.

Nama	17. Optimalisasi pengendalian keragaman teknologi
Pernyataan	Pengendalian keragaman teknologi harus dilakukan untuk dapat mengoptimalkan biaya operasional maupun biaya pemeliharaan teknologi.
Dasar Pertimbangan	Membatasi keragaman dan jumlah komponen teknologi yang digunakan dapat mempermudah implementasi, operasional, pemeliharaan, dan mengurangi biaya.
Implikasi	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan, prosedur, dan standar yang mengatur akuisisi teknologi harus mengacu kepada prinsip ini. • Pemilihan teknologi akan dibatasi dalam Tata Kelola SPBE yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Karawang.

Nama	18. Interoperabilitas yang baik
Pernyataan	Perangkat lunak dan perangkat keras SPBE harus sesuai dengan standar yang ditetapkan, dan yang memiliki karakteristik interoperabilitas data, aplikasi, dan teknologi.
Dasar Pertimbangan	Standardisasi membantu dalam memastikan konsistensi, sehingga dapat meningkatkan kemampuan untuk mengelola sistem dan meningkatkan kepuasan pengguna.
Implikasi	<ul style="list-style-type: none"> • Memahami bahwa terdapat standardisasi untuk perangkat lunak dan perangkat keras. • Standar interoperabilitas harus dipatuhi, kecuali terdapat kebutuhan bisnis yang kuat untuk menerapkan solusi yang tidak standar. • Harus dibuat prosedur penetapan standar, melakukan peninjauan, dan merevisi secara berkala.

Nama	19. Arsitektur teknologi yang lengkap
Pernyataan	Arsitektur teknologi harus disusun dengan lengkap berdasarkan <i>best practice</i> .
Dasar Pertimbangan	Arsitektur teknologi harus sejalan dengan tujuan bisnis Pemerintah Kabupaten Karawang dan dapat digunakan sebagai alat bantu pengadaan untuk mengelola infrastruktur pada Pemerintah Kabupaten Karawang.
Implikasi	Masing-masing unit harus mendukung dan memberikan masukan terkait dengan kebutuhan teknologi yang mendukung proses bisnis.

Nama	20. Keamanan SPBE merupakan tanggung jawab semua pihak
Pernyataan	Keamanan SPBE harus menjadi perhatian semua pihak pada Pemerintah Kabupaten Karawang, maupun pihak di luar organisasi yang terkait.
Dasar Pertimbangan	Semua pihak terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyediaan, penyimpanan, pemanfaatan, dan penyebaran informasi yang tersimpan dalam sistem SPBE.
Implikasi	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu adanya komitmen yang tinggi untuk mematuhi semua prinsip dan kebijakan SPBE yang telah dibuat. • Semua pihak bertanggung jawab untuk mengelola dan memantau efektivitas keamanan SPBE.

Nama	21. Penanganan ancaman keamanan SPBE yang antisipatif
Pernyataan	Pemerintah Kabupaten Karawang harus mengevaluasi ancaman keamanan SPBE saat ini dan di masa yang akan datang secara berkala.
Dasar Pertimbangan	Untuk menganalisis dan menilai ancaman terhadap keamanan SPBE yang muncul sehingga mitigasinya dapat ditentukan.
Implikasi	<ul style="list-style-type: none"> • Memahami potensi ancaman terhadap keamanan SPBE dan melaksanakan mitigasi terkait dengan fungsi dan peran masing-masing dalam organisasi • Ancaman yang telah teridentifikasi harus dicari penyebabnya dan dibuatkan mitigasinya.

G. Prinsip SDM SPBE

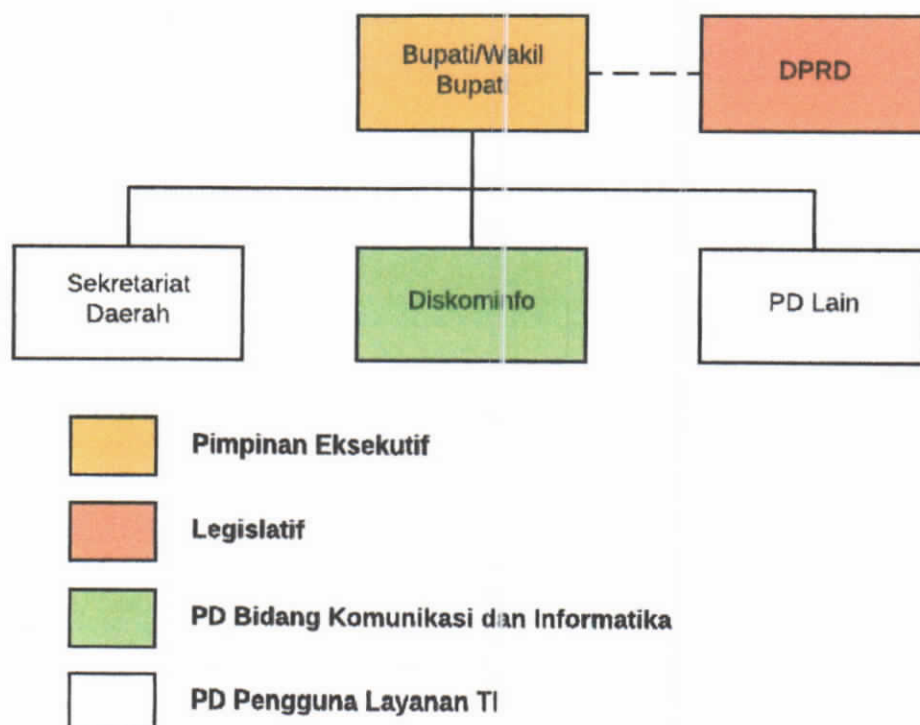
Nama	22. Sumber daya manusia SPBE yang kompeten
Pernyataan	Terdapat acuan yang digunakan untuk mendefinisikan tugas beserta tingkat keterampilan yang dibutuhkan untuk sumber daya manusia SPBE.
Dasar Pertimbangan	Dibutuhkan sumber daya manusia SPBE yang tepat dan dengan mekanisme yang jelas.
Implikasi	<ul style="list-style-type: none"> • Fungsi terkait dalam Pemerintah Kabupaten Karawang harus dapat membantu dalam pelaksanaan prinsip ini. • Dilakukannya <i>Job and Competency Assessment</i> bagi seluruh personil SPBE yang nantinya akan dijadikan dasar penentuan alokasi sumber daya manusia SPBE. • Pengisian <i>Job Position</i> harus benar sesuai berdasarkan kompetensi yang dimiliki.

BAB VI ANALISIS KONDISI SAAT INI

Bab ini menerangkan mengenai kondisi saat ini di Pemerintah Kabupaten Karawang yang meliputi tata kelola SPBE, arsitektur proses bisnis, arsitektur sistem informasi, arsitektur infrastruktur, dan potret SDM.

1. Tata Kelola SPBE

Tata kelola SPBE terdiri atas elemen kelembagaan dan kebijakan. Potret tata kelola SPBE di Kabupaten Karawang saat ini masih baru pada tahap perumusan konsep. Identifikasi dari aspek kelembagaan dilakukan melalui analisis struktur organisasi SPBE yang ada saat ini. Struktur organisasi SPBE Pemerintah Kabupaten Karawang saat ini dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 11. Struktur Organisasi SPBE Saat Ini

Dapat dilihat pada Gambar 11, bahwa untuk pengelolaan urusan pemerintahan daerah bidang komunikasi dan informatika yang menjadi kewenangan Kabupaten Karawang dipegang oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Karawang. Sebuah organisasi yang ingin menyelaraskan kebutuhan bisnis dengan kebutuhan SPBE perlu peran seorang *Chief Information Officer* (CIO). Dalam organisasi pemerintah

juga diperlukan *Government CIO* (GCIO) yang mempunyai tugas sebagai berikut:

- Mengantisipasi terhadap kecenderungan perubahan kontekstual antara teknologi, bisnis, dan tata kelola serta peluang bisnis dalam organisasi pemerintahan
- Menentukan visi, tujuan, dan sasaran SPBE serta memimpin organisasi untuk menghasilkan nilai bagi organisasi pemerintahan tersebut
- Menentukan arah dan pengaruh SPBE dalam organisasi pemerintahan serta menjembatani antara bisnis dan TI
- Menentukan distribusi sumber daya, peran dan tanggung jawab untuk menjalankan komitmen dan pelayanan
- Mengelola hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan dan proyek untuk mencapai tujuan organisasi pemerintahan
- Mengukur nilai dukungan SPBE bagi organisasi, dan secara proaktif mengelola kinerja berdasarkan hasil, serta mendistribusikan teknik, alat dan inovasi (pendekatan baru)

Peran yang tak kalah pentingnya dari GCIO adalah *IT Steering Committee*. *IT Steering Committee* berfungsi untuk memastikan strategi SPBE sejalan dengan tujuan strategis organisasi, monitoring dan membuat prioritas proyek-proyek SPBE dari perspektif lintas fungsional. Pemerintah Kabupaten Karawang belum menentukan siapa yang harus berperan sekaligus membuat kebijakan sebagai GCIO dan *IT Steering Committee* tersebut.

Dalam pengelolaan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, Diskominfo berkoordinasi dengan perangkat daerah lainnya di lingkup Kabupaten Karawang khususnya dalam hal penyediaan dan pengelolaan infrastruktur dan aplikasi berbagi pakai serta penyediaan informasi dan komunikasi publik. Umumnya perangkat daerah lain di Kabupaten Karawang menggunakan aplikasi dan infrastruktur komunikasi dan informasi yang disediakan dan dikelola oleh Diskominfo.

Dari aspek kebijakan, masih sangat minim kebijakan SPBE yang dihasilkan oleh Pemerintah Kabupaten Karawang. Kebijakan SPBE yang ditemukan adalah Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Selain itu, juga telah disusun Review Rencana Induk E-Government Kabupaten Karawang pada tahun 2017. Review Rencana Induk E-Government Kabupaten Karawang terdiri atas:

- Rencana Induk Pengembangan Sumber Daya Manusia
- Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur Jaringan
- Rencana Induk Pengembangan Sistem/Aplikasi
- Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur Informasi/Data
- Rencana Induk Tata Kelola TIK dan GCIO
- Rencana Induk Kebijakan dan Prosedur

Pada tahun 2018, sedang disusun Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang akan menjadi dasar implementasi dari Rencana Induk SPBE ini.

2. Arsitektur Proses Bisnis

Pendefinisian arsitektur proses bisnis Pemerintah Kabupaten Karawang dilakukan dengan menggunakan *value chain analysis*. *Value chain analysis* adalah sebuah konsep manajemen bisnis yang dikemukakan dan dipopulerkan oleh Michael Porter pada tahun 1985 melalui bukunya yang berjudul "*Competitive Advantage : Creating and Sustaining Superior Performance*". Konsep *value chain* merupakan rangkaian kegiatan/aktivitas operasional sebuah organisasi. Produk yang melewati setiap rantai nilai akan mengalami penambahan nilai. *Value chain analysis* dapat digunakan sebagai alat analisis peranan SPBE dalam proses bisnis organisasi. *Value chain* terdiri atas rangkaian aktivitas utama dan pendukung yang pada ujungnya untuk mencapai sebuah nilai tertentu.

Value chain analysis Pemerintah Kabupaten Karawang didasarkan pada susunan perangkat daerah yang ada (Perda nomor 14 tahun 2014). *Value chain analysis* Pemerintah Kabupaten Karawang terdiri atas lima aktivitas utama dan lima aktivitas pendukung. Kelima aktivitas utama tersebut mengacu pada siklus layanan dalam Information Technology Infrastructure Library (ITIL). ITIL sendiri merupakan framework yang paling populer dalam Information Technology Service Management (ITSM). Diagram *value chain* Pemerintah Kabupaten Karawang seperti terlihat pada gambar berikut:



Gambar 12. *Value Chain* Pemerintah Kabupaten Karawang

Aktivitas utama terdiri atas:

1. **Strategi Layanan**, panduan untuk menentukan tujuan/sasaran serta ekspektasi nilai kinerja dalam mengelola layanan SPBE serta untuk mengidentifikasi, memilih dan memprioritaskan berbagai rencana perbaikan operasional maupun organisasi di dalam organisasi.

2. **Perancangan Layanan**, panduan untuk mendesain dan membangun layanan SPBE secara sistematis dan best practices.
3. **Transisi Layanan**, panduan untuk dapat mengembangkan serta kemampuan untuk mengubah hasil desain layanan SPBE baik yang baru maupun layanan SPBE yang diubah spesifikasinya ke dalam lingkungan operasional.
4. **Penyelenggaraan Layanan**, panduan mengelola layanan SPBE secara efektif dan efisien serta menjamin tingkat kinerja yang telah dijanjikan dengan pengguna.
5. **Pengembangan Layanan**, panduan dalam menyusun serta memelihara kualitas layanan dari proses perancangan, transisi dan penyelenggaraan layanan SPBE.

Sedangkan, aktivitas pendukung terdiri atas:

1. **Perencanaan Strategis**
2. **Manajemen Keuangan**
3. **Manajemen SDM**
4. **Pengembangan TIK**
5. **Pengadaan**

Nilai akhir yang hendak dicapai sesuai dengan Visi SPBE yang telah ditetapkan di awal adalah terwujudnya **Pelayanan Prima**. Pelayanan Prima dapat terwujud jika memenuhi 3 (tiga) indikator sebagai berikut :

- Kepuasan dan komitmen SDM birokrasi
- Kepuasan masyarakat
- Kepercayaan masyarakat

3. **Arsitektur Sistem Informasi**

Aplikasi eksisting di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang terdiri dari aplikasi yang secara spesifik dikembangkan dan/atau diimplementasikan secara internal untuk digunakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang dan aplikasi yang berasal dari instansi pemerintahan lain (aplikasi eksternal). Aplikasi eksternal digunakan di Pemerintah Kabupaten Karawang sebagai salah satu instansi pemerintah yang wajib menggunakan atau difasilitasi untuk menggunakan aplikasi tersebut. Baik aplikasi internal maupun eksternal ada yang merupakan Aplikasi Umum Berbagi Pakai. Aplikasi Umum Berbagi Pakai adalah aplikasi yang sama, standar, dan digunakan secara berbagi pakai oleh

Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah, seperti aplikasi naskah dinas elektronik, aplikasi manajemen kepegawaian, aplikasi penganggaran berbasis kinerja, aplikasi pengaduan publik (e-Lapor), dan sebagainya.

Aplikasi eksisting secara umum sudah mendukung beberapa fungsi dan layanan utama dan berjalan dengan baik, namun demikian pada beberapa fungsi lainnya masih belum di dukung aplikasi. Beberapa aplikasi berbagi pakai yang sudah dimanfaatkan dengan baik diantaranya aplikasi LPSE, SIMDA, dan PARE. Terdapat juga beberapa aplikasi eksisting yang pemanfaatannya tidak dan belum maksimal dikarenakan beberapa kendala baik teknis maupun non teknis. Aplikasi internal di Pemerintah Kabupaten Karawang umumnya belum terintegrasi dan masih bersifat pulau-pulau informasi (*island of information*). Aplikasi yang ada umumnya merupakan aplikasi yang bersifat transaksional untuk mendukung fungsi organisasi tertentu, dan belum ada aplikasi yang bersifat analitik (*analytical*) untuk mendukung kepentingan analisis dan pengambilan keputusan di level eksekutif atau pimpinan yang bersifat komprehensif. Tabel 1 menunjukkan daftar aplikasi dan website yang ada di Pemerintah Kabupaten Karawang.

Tabel 1. Daftar Aplikasi dan Website Pemerintah Kabupaten Karawang

No	Nama Aplikasi	Perangkat Daerah	URL	Ket.	Status
1	Website Bappeda	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	bappeda.karawangkab.go.id	Website	Aktif
2	E-Planning	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	e-planning.karawangkab.go.id	Aplikasi	Aktif
3	Website BKPSDM	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	bkd.karawangkab.go.id	Website	Aktif
4	Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIMASN)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	silk.bkpsdm.karawangkab.go.id/home/	Aplikasi	Aktif
5	Performance Agreement Report by Electronic (PARE)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	silkbkd.karawangkab.go.id/pare	Aplikasi	Aktif
6	SIAPADD	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	siapadd.karawangkab.go.id	Aplikasi	
7	Website Kab. Karawang	Dinas Komunikasi dan Informatika	karawangkab.go.id	Website	Aktif
8	Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	Dinas Komunikasi dan Informatika	lpse.karawangkab.go.id	Aplikasi	Aktif
9	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Dinas Komunikasi dan Informatika	ppid.karawangkab.go.id	Website	Aktif
10	SMS Center	Dinas Komunikasi dan Informatika	smsc.karawangkab.go.id	Aplikasi	Aktif
11	Kliping	Dinas Komunikasi dan Informatika	kliping.karawangkab.go.id	Aplikasi	Aktif

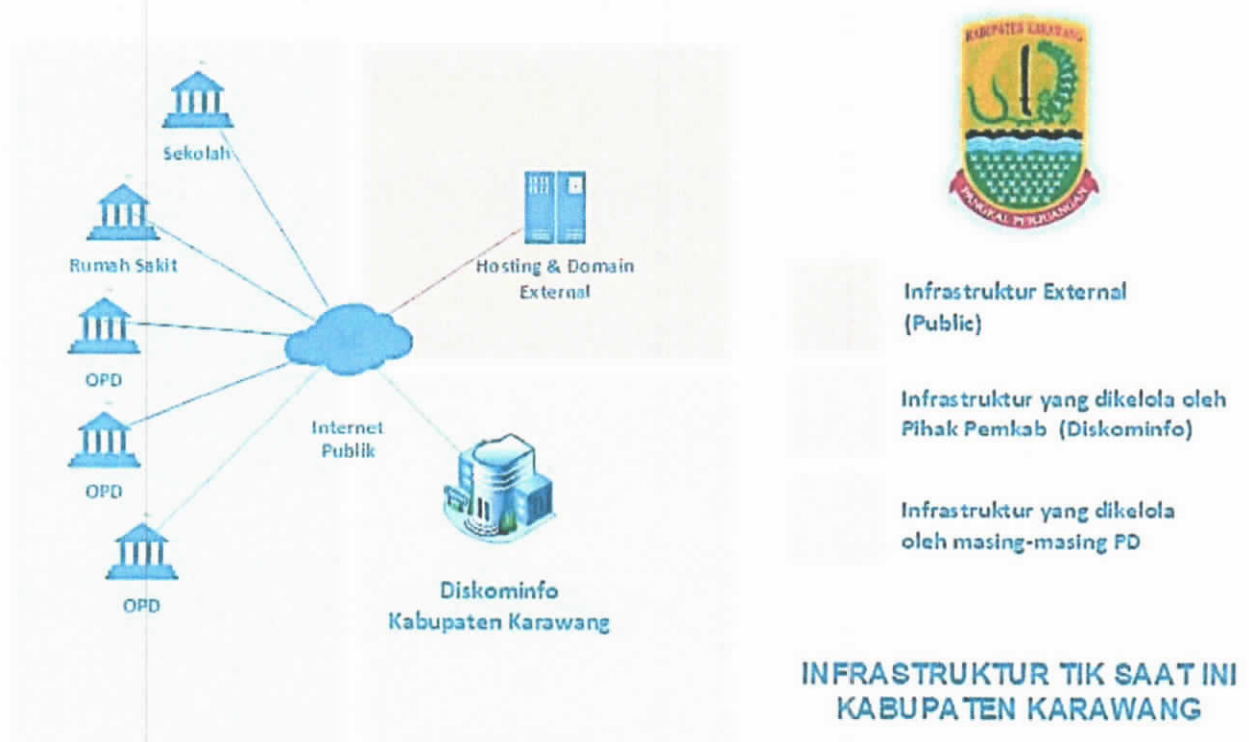
12	STURADA	Dinas Komunikasi dan Informatika	sturada.karawangkab.go.id	Website	Tidak Aktif
13	Website Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	dinkes.karawangkab.go.id	Website	Aktif
14	Sistem Informasi Rujukan Terpadu Terintegrasi	Dinas Kesehatan	rujukan.karawangkab.go.id	Aplikasi	Aktif
15	Website Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	disdikpora.karawangkab.go.id	Website	Aktif
16	Website Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan	dishub.karawangkab.go.id	Website	Aktif
17	Website Dinas Pertanian	Dinas Pertanian	distan.karawangkab.go.id	Website	Aktif
18	Website Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	dlhk.karawangkab.go.id	Website	Aktif
19	Website Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	dpmptsp.karawangkab.go.id	Website	Aktif
20	I-LINE	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	i-line.dpmptsp.karawangkab.go.id	Aplikasi	Aktif
21	DARUS	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	darus.dpmptsp.karawangkab.go.id	Aplikasi	Tidak Aktif

22	Website Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	dukcapil.karawangkab.go.id	Website	Aktif
23	Website Inspektorat	Inspektorat	inspektorat.karawangkab.go.id	Website	Aktif
24	Website Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah	Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah	monografi.karawangkab.go.id	Website	Aktif
25	Website Bagian Kerjasama Daerah Sekretariat Daerah	Bagian Kerjasama Daerah Sekretariat Daerah	kerjasama.karawangkab.go.id	Website	Aktif
26	Website Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	disnakertrans.karawangkab.go.id	Website	Aktif
27	SIMTA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	simta.disnakertrans.karawangkab.go.id	Aplikasi	Aktif
28	SIPTEK	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	siptek.disnakertrans.karawangkab.go.id	Aplikasi	Aktif
29	Website Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	dppkb.karawangkab.go.id	Website	Aktif

4. Arsitektur Infrastruktur

Infrastruktur SPBE Kabupaten Karawang saat ini secara garis besar masih dikelola oleh masing-masing Perangkat Daerah. Adapun layanan yang sudah disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karawang adalah layanan hosting dan domain untuk perangkat daerah yang membutuhkan. Pengelolaan hosting dan domain yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika juga memanfaatkan pihak ketiga (swasta) sebagai penyedia layanan server (*Virtual Private Server*) yang terletak di Bandung.

Infrastruktur berupa jaringan komunikasi (Internet) baik kabel maupun nirkabel, untuk saat ini di setiap Perangkat Daerah masih dikelola masing-masing. Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karawang dalam hal ini juga hanya menyediakan koneksi internet dan LAN untuk kepentingan internal Dinas Komunikasi dan Informatika.



Gambar 13. Infrastruktur SPBE Saat Ini Kabupaten Karawang

5. SDM SPBE

SDM SPBE merupakan salah satu faktor utama untuk mendukung keberhasilan implementasi dan pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang. Untuk memenuhi kebutuhan kualitas dan kuantitas SDM SPBE perlu dilakukan analisis terhadap kebutuhan SDM SPBE. Analisis kebutuhan SDM SPBE dapat dilakukan dengan pendekatan melakukan kajian terhadap katalog tugas/fungsi dan SDM SPBE yang dibutuhkan serta kajian terhadap pemetaan SDM SPBE yang tersedia saat ini terhadap tugas dan fungsi. Hasil dari kedua

kajian tersebut akan dilakukan analisis terhadap kesenjangan yang muncul (*gap analysis*).

Tahapan untuk mendapatkan data untuk kajian SDM SPBE yang tersedia saat ini dilakukan dengan pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang dilaksanakan adalah dengan kajian pustaka dan regulasi mengenai SDM SPBE dan proses *focus group discussion* (FGD).

Berdasarkan kajian pustaka SDM SPBE dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu:

1. *ICT workers* atau *ICT professionals* yaitu SDM SPBE yang memiliki kemampuan mengembangkan produk-produk SPBE baik perangkat keras, perangkat lunak, ataupun jasa pada lingkungan industri TI atau tersebar di berbagai organisasi yang menerapkan TI.
2. *ICT-enabled Workers* atau *ICT users* yaitu SDM SPBE yang aktif berperan sebagai user atau pengguna yang mampu memanfaatkan perangkat SPBE untuk mendukung pekerjaan sehari-hari.

Area pekerjaan yang membutuhkan SDM SPBE meliputi sistem manajemen data, pemrograman dan pengembangan perangkat lunak, perangkat keras dan peripheral digital, jaringan komputer dan infrastruktur, sistem operasi, pengembangan teknologi dan sistem informasi, tata kelola dan manajemen SPBE, manajemen proyek SPBE, arsitektur SPBE di perusahaan, keamanan dan kepatuhan SPBE, sistem manajemen layanan SPBE, manajemen fasilitas komputasi, multimedia, *Internet of Things* dan *IT mobility*, sistem aplikasi terintegrasi dan jasa konsultasi TI.

Berdasarkan hasil FGD yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karawang kepada seluruh Perangkat Daerah (PD) terhadap ketersediaan SDM SPBE saat ini, secara umum ketersediaan SDM SPBE masih belum dipenuhi dibandingkan dengan layanan yang sudah dilaksanakan berbasis SPBE yang dimiliki oleh PD. Permasalahan yang terjadi pada SDM PD meliputi kurangnya jumlah SDM SPBE, kurangnya dukungan PD terhadap pengembangan SDM SPBE, dan sebagian besar masih menggunakan tenaga kontrak.

6. Identifikasi Permasalahan

Secara umum, melalui analisis tata kelola SPBE, arsitektur proses bisnis, arsitektur sistem informasi, arsitektur infrastruktur dan SDM SPBE masih perlu mengalami banyak pengembangan di setiap lini. Untuk memotret kondisi saat ini, juga digunakan *tools SWOT analysis* untuk mengetahui lingkungan internal dan eksternal organisasi Pemerintah Kabupaten Karawang.

Analisis SWOT adalah alat yang digunakan untuk mengidentifikasi isu-isu internal dan eksternal yang mempengaruhi kemampuan organisasi dalam menjalankan aktivitasnya. Analisis SWOT adalah sebuah bentuk analisis situasi dan kondisi yang bersifat deskriptif (memberi gambaran) yang terbagi atas empat komponen dasar yaitu:

S = *Strength (Kekuatan)*, adalah situasi atau kondisi yang merupakan kekuatan dari organisasi atau program pada saat ini.

W = *Weakness (Kelemahan)*, adalah situasi atau kondisi yang merupakan kelemahan dari organisasi atau program pada saat ini.

O = *Opportunity (Peluang)*, adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang di luar organisasi dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi di masa depan.

T = *Threat (Tantangan)*, adalah situasi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi dan dapat mengancam eksistensi organisasi di masa depan.



Gambar 14. Analisis Strategis Menggunakan Analisis SWOT

Mengacu pada visi dan misi Pemerintah Kabupaten Karawang di atas, kemudian dilakukan analisis lingkungan strategis melalui analisis lingkungan internal (ALI) dan analisis lingkungan eksternal (ALE)

Analisis Lingkungan Internal (ALI)

Analisis lingkungan internal dilakukan melalui pencermatan lingkungan internal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang yang hasilnya dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Kekuatan (*Strength*)
 - a. Adanya landasan hukum mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
 - b. Regulasi mengenai Sistem Manajemen Pengamanan Informasi
 - c. Adanya dukungan dari pimpinan terkait pengembangan SDM dan implementasi layanan SPBE di masing-masing organisasi
 - d. Adanya kesadaran dari seluruh pemangku kepentingan terkait mengenai kebutuhan dan manfaat layanan SPBE bagi organisasi
 - e. Terdapat beberapa layanan aplikasi generik yang sudah dipergunakan dan berjalan dengan baik
 - f. Semakin meningkatnya kuantitas dan kualitas mitra pengembang, pengelola dan penyedia layanan SPBE
2. Kelemahan (*Weakness*)
 - a. Kurangnya kuantitas dan kompetensi SDM pengelola SPBE
 - b. Kompetensi SDM yang tersedia belum memenuhi kebutuhan teknis dari kemungkinan masalah yang akan dihadapi
 - c. Masih banyak terdapat layanan SPBE yang belum didukung dengan payung hukum atau regulasi/kebijakan yang dapat mengikat dan mengatur implementasi dan operasional layanan SPBE
 - d. Masih kurangnya sosialisasi terhadap regulasi, kebijakan dan prosedur SPBE
 - e. Belum adanya dokumentasi dan inventarisasi aset SPBE yang lengkap update dan terstruktur
 - f. Akses terhadap beberapa layanan umum banyak dikeluhkan kualitasnya
 - g. Belum adanya standar pengamanan informasi terkait seluruh data yang dikelola.

Analisis Lingkungan Eksternal (ALE)

Analisis lingkungan eksternal dilakukan melalui pencermatan lingkungan eksternal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang yang hasilnya dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Peluang (*Opportunity*)
 - a. Adanya kebutuhan penyedia layanan infrastruktur SPBE terpusat yang dapat digunakan PD

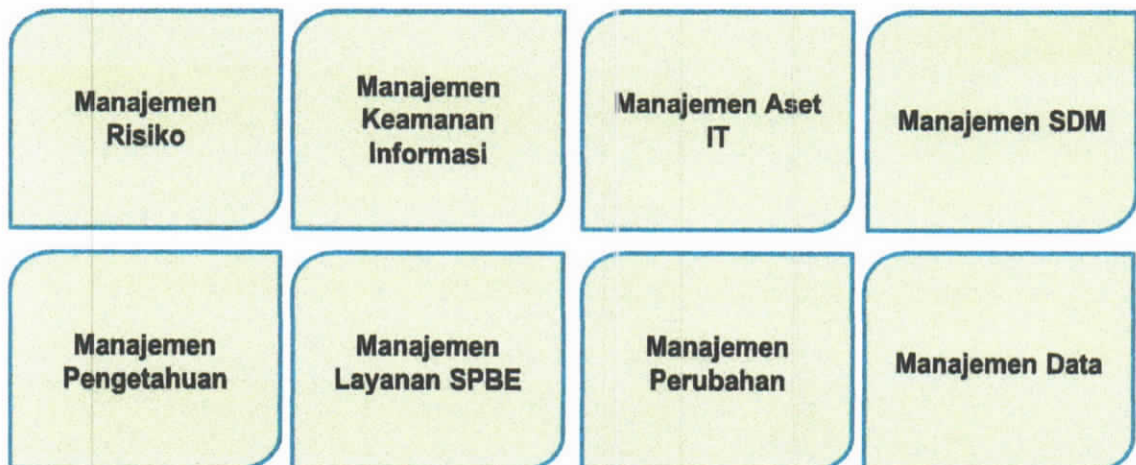
- b. Adanya kebutuhan akan standarisasi kebutuhan SPBE minimal untuk seluruh PD
 - c. Adanya kebutuhan aplikasi berbagi pakai antar PD yang bersifat umum
 - d. Adanya kebutuhan berbagi data dan integrasi aplikasi antar PD untuk mewujudkan konsep layanan Satu Data
 - e. Adanya kebutuhan pengelolaan fungsi keamanan informasi dan persandian terintegrasi secara terpusat
2. Ancaman (*Threats*)
- a. Semakin meningkatnya ancaman keamanan informasi baik secara kuantitas maupun kualitas
 - b. Semakin meningkatnya risiko implementasi SPBE apabila tidak didukung dengan adanya tata kelola dan manajemen SPBE yang baik
 - c. Perkembangan SPBE yang sangat cepat dan dinamika politik yang perlu diadaptasi dengan segera.

BAB VII KONDISI YANG DIHARAPKAN

1. Tata Kelola SPBE

Rancangan Tata Kelola SPBE harus bisa menjawab permasalahan tata kelola SPBE di Pemerintah Kabupaten Karawang sekarang. Untuk menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam pengelolaan SPBE, maka perlu disusun Tata Kelola SPBE yang menjadi bagian integral dari Enterprise Governance agar dapat menjamin pemanfaatan dari implementasi SPBE.

Tata Kelola dan Manajemen SPBE yang terdiri dari kebijakan, standar, prosedur bahkan sampai dengan panduan diperlukan untuk memastikan bahwa proses “Governance” dan “Management” dilakukan berdasarkan best/good practices secara konsisten. Berdasarkan Perpres Nomor 95 Tahun 2018, Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, melingkupi hal-hal berikut:



Gambar 15. Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Berikut ini adalah pemetaan Daftar Kebijakan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang yang perlu ada:

Tabel 2. Pemetaan Kebijakan SPBE Masa Depan Pemerintah Kabupaten Karawang

No	Aspek Kebijakan	Item Kebijakan
1	Governance	Tata Kelola SPBE
1.1	Kepemimpinan	Kebijakan Pengarah SPBE
1.2	Struktur Kelembagaan	Kebijakan Kelembagaan SPBE
1.3	Mekanisme <i>Evaluate, Direct, Monitor</i>	Kebijakan Kelembagaan SPBE
2	Prinsip Manajemen Sumber Daya	
2.1	Data dan Informasi	Kebijakan Pengelolaan Data/ Satu Data
2.2	Aplikasi	Kebijakan Integrasi Aplikasi
		Kebijakan Aplikasi Berbagi Pakai
		Kebijakan Layanan Naskah Dinas
		Kebijakan Manajemen Kepegawaian
		Kebijakan Manajemen Perencanaan dan Penganggaran
		Kebijakan Layanan Manajemen Keuangan

No	Aspek Kebijakan	Item Kebijakan
		Kebijakan Layanan Manajemen Kinerja Kebijakan Internal Layanan Pengadaan Kebijakan Internal Pengaduan Publik Kebijakan Internal Layanan Dokumentasi dan Hukum Kebijakan Internal Whistle Blowing System Kebijakan Layanan Publik
2.3	Infrastruktur	Kebijakan Pengelolaan Infrastruktur
		Kebijakan Pengoperasian Pusat Data
2.4	SDM	Kebijakan SDM SPBE
3	Mekanisme Umum Siklus Manajemen SPBE	
3.1	Perencanaan dan Belanja/Investasi SPBE	Kebijakan Rencana Induk
		Kebijakan Internal Anggaran SPBE
3.2	Manajemen Risiko	Kebijakan Manajemen Keamanan dan Risiko Informasi
3.3	Manajemen Pengembangan, Akuisisi dan Implementasi SPBE	Kebijakan Pengembangan Sistem Informasi

No	Aspek Kebijakan	Item Kebijakan
3.3	Manajemen Operasi dan Dukungan SPBE	Kebijakan Manajemen Layanan/ Operasional SPBE
3.4	Pemantauan dan Evaluasi	Kebijakan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja SPBE

Untuk merealisasikan kepemimpinan SPBE yang baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang, peran Bupati/Wakil Bupati semata tidaklah cukup. Perlu dukungan dan sinergi dengan seluruh stakeholder terkait, khususnya organisasi pengelola SPBE (Dinas Komunikasi dan Informatika) bersama Perangkat Daerah lainnya. Untuk merealisasikan peran sinergi pimpinan tersebut, perlu adanya jabatan strategis yang memadukan teknologi dan sistem informasi dengan aspek-aspek manajemen lainnya agar dapat memberikan dukungan maksimal terhadap pencapaian tujuan organisasi. Peran ini dikenal dengan nama CIO (*Chief Information Officer*). Selain CIO, sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional, perlu juga dibentuk Komite Pengarah SPBE. Pembentukan CIO dan Komite Pengarah SPBE merupakan prioritas dalam penyusunan struktur tata kelola SPBE. CIO dalam menjalankan tugasnya senantiasa memperhatikan masukan dari Komite Pengarah SPBE.

Adapun peran Komite TI berdasarkan peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 adalah:

1. Mensinergikan dan mengintegrasikan Rencana TI institusi yang mengakomodir kepentingan seluruh satuan kerja.
2. Mensinergikan rencana belanja/investasi satuan kerja untuk memastikan tidak adanya tumpang tindih (*redundancy*) inisiatif TI
3. Melakukan review atas evaluasi berkala implementasi TI yang dilakukan oleh CIO, untuk memastikan keselarasan dengan rencana semula

Saat ini peran dan jabatan CIO serta Komite Pengarah SPBE belum ada di Pemerintah Kabupaten Karawang. Untuk merealisasikan hal ini ke depan, perlu dibuat usulan kebijakan dalam bentuk Keputusan Bupati.

Berdasarkan Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, pada level Pemerintah Daerah perlu dibentuk **Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah**. Tim koordinasi SPBE diberi tugas untuk mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan SPBE yang terpadu di Pemerintah Daerah, serta melakukan koordinasi dengan Tim Koordinasi SPBE Nasional untuk pelaksanaan SPBE yang melibatkan lintas Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah penyelenggara, pemantauan dan evaluasi SPBE. Apabila melihat fungsi Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah ini, maka sesuai dengan peran Komite Pengarah SPBE.

Tim pembentukannya dilakukan sesuai koordinasi sebagai berikut:

1. **Kepala Daerah** bertugas melakukan koordinasi dan penetapan kebijakan SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah
2. Koordinator SPBE Pemerintah Daerah dijabat oleh **Sekretaris Daerah**, bertugas :
 - Melakukan koordinasi dan penetapan kebijakan SPBE Pemerintah Daerah
 - Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap SPBE Pemerintah Daerah dan berkala

2. **Arsitektur Bisnis Organisasi**

Untuk melakukan identifikasi mengenai fungsi bisnis pemerintahan, dilakukan berdasarkan referensi yang terdapat pada UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam UU ini, urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

Urusan pemerintahan konkuren menjadi kewenangan Daerah, terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Pada pemerintah daerah, urusan pemerintahan tersebut diimplementasikan pada beberapa Perangkat Daerah (PD).

Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yaitu:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. sosial.

Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah sebagai berikut:

- a. tenaga kerja;
- b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pangan;
- d. pertanahan;
- e. lingkungan hidup;
- f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. pemberdayaan masyarakat dan desa;
- h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. perhubungan;
- j. komunikasi dan informatika;
- k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l. penanaman modal;
- m. kepemudaan dan olahraga;
- n. statistik;
- o. persandian;
- p. kebudayaan;
- q. perpustakaan; dan
- r. kearsipan.

Sedangkan Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah, yang terdiri dari:

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pariwisata;
- c. pertanian;
- d. kehutanan;
- e. energi dan sumber daya mineral;
- f. perdagangan;
- g. perindustrian; dan
- h. transmigrasi.

Untuk keseluruhan fungsi bisnis organisasi Pemerintah Kabupaten Karawang, dapat dipetakan ke Perangkat Dinas terkait, kemudian diidentifikasi Layanan yang terkait seperti ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 3. Pemetaan Fungsi, PD dan Layanan

No	Fungsi	Perangkat Daerah	Layanan
A	Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar		
1	Pendidikan	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	<ul style="list-style-type: none"> - Standar Pelayanan Minimal Pendidikan - Layanan Pendidikan - Layanan Info Sekolah, Infrastruktur Sekolah, Sarana & Prasarana - Perizinan dan Akreditasi Pendidikan
2	Kesehatan	Dinas Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - Standar Pelayanan Minimal Kesehatan - Informasi Kesehatan - Pelatihan Kesehatan - Layanan Kesehatan - Perizinan dan Akreditasi Kesehatan - Pengelolaan Sarana Kesehatan - Laboratorium Kesehatan
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<ul style="list-style-type: none"> - Perizinan Penataan Ruang Daerah - Pembangunan Infrastruktur - Pemeliharaan Infrastuktur - Pengawasan
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	<ul style="list-style-type: none"> - Perizinan Perumahan dan Pemukiman Daerah - Pengawasan Pemanfaatan

No	Fungsi	Perangkat Daerah	Layanan
			<ul style="list-style-type: none"> - Perencanaan tata ruang kawasan, permukiman, perumahan, dan jasa konstruksi - Pengawasan dan Pengendalian tata ruang kawasan, permukiman, perumahan, dan jasa konstruksi
5	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja	<ul style="list-style-type: none"> - Penegakan peraturan perundang-undangan Daerah, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat
6	Sosial	Dinas Sosial	<ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan Fasilitas Sosial - Perizinan dan Akreditasi Sosial - Pengelolaan Layanan pemberdayaan partisipasi sosial masyarakat, pengembangan sosial, pemulihan sosial, bantuan dan perlindungan sosial
B Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar			
7	Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pemagangan Tenaga Kerja - Pelatihan Produktivitas - Peningkatan Kesempatan Kerja - Perlindungan Ketenagakerjaan - Perizinan Tenaga Kerja Asing
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan - Peningkatan Kualitas Keluarga

No	Fungsi	Perangkat Daerah	Layanan
			<ul style="list-style-type: none"> - Pemenuhan Hak Anak - Perlindungan Perempuan dan Anak
9	Pangan	Dinas Pangan	<ul style="list-style-type: none"> - Perizinan Pangan Daerah - Pengawasan dan Pengendalian Pangan
10	Pertanahan	Badan Pertanahan Nasional	<ul style="list-style-type: none"> - Perizinan Pertanahan Daerah - Pengawasan dan Pengendalian Pertanahan
11	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	<ul style="list-style-type: none"> - Perizinan Lingkungan Hidup Daerah - Tata Kelola Lingkungan - Pengendalian Pencemaran Lingkungan - Konservasi dan Pengendalian Perubahan Iklim - Penataan Hukum Lingkungan
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	<ul style="list-style-type: none"> - Layanan Kependudukan dan Catatan Sipil - Pendataan Kependudukan
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberdayaan Masyarakat - Pengelolaan Organisasi Kemasyarakatan
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	<ul style="list-style-type: none"> - Layanan KB
15	Perhubungan	Dinas Perhubungan	<ul style="list-style-type: none"> - Perizinan Perhubungan Daerah - Layanan Perhubungan

No	Fungsi	Perangkat Daerah	Layanan
			- Manajemen Lalu Lintas Jalan Raya
16	Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	- Tata Kelola SPBE - Layanan Aplikasi - Layanan Infrastruktur SPBE - Layanan Komunikasi dan Informasi Publik
17	Koperasi, Usaha Kecil Menengah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	- Layanan Koperasi dan UKM - Perizinan dan Pendataan KUKM - Bantuan sarana, prasaranan, permodalan KUKM - Penelitian, Pengembangan, Pembinaan dan Penyuluhan KUKM
18	Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	- Perizinan Penanaman Modal Daerah - Pengelolaan Kemitraan - Pendayagunaan Aset dan Investasi Daerah
19	Kepemudaan dan Olah Raga	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	- Perizinan Kepemudaan dan Olahraga - Pengelolaan Fasilitas Olahraga dan Kepemudaan - Pengelolaan Event Olahraga dan Kepemudaan
20	Statistik	Dinas Komunikasi dan Informatika	- Pengumpulan Data Statistik - Pengolahan Data Statistik - Penyajian Data Statistik
21	Persandian	Dinas Komunikasi dan Informatika	- Perencanaan Keamanan Informasi dan Persandian

No	Fungsi	Perangkat Daerah	Layanan
			<ul style="list-style-type: none"> - Layanan Infrastruktur keamanan Informasi dan Persandian - Layanan Assessment, Audit dan Pengujian Keamanan Informasi - Persandian untuk Keamanan Informasi
22	Kebudayaan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> - Perizinan dan promosi kegiatan kebudayaan dan seni - Penilaian dan pengkajian kebudayaan dan seni - Pemberian bantuan sarana dan prasarana kebudayaan/seni - Dokumentasi seni dan kebudayaan
23	Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Layanan Perpustakaan dan Arsip Daerah
C	Pilihan		
24	Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> - Layanan Perikanan - Layanan Pembudidayaan Ikan - Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan - Layanan Pengawasan Sumber Daya Perikanan - Perizinan Perikanan
25	Pariwisata	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> - Layanan Destinasi Pariwisata - Layanan Industri Pariwisata - Layanan Pemasaran

No	Fungsi	Perangkat Daerah	Layanan
			<ul style="list-style-type: none"> - Perizinan Usaha Pariwisata - Pengelolaan Fasilitas Pariwisata - Kerjasama Pariwisata Internasional
26	Pertanian	Dinas Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> - Layanan Tanaman Pangan - Layanan Penyuluhan - Layanan Sumber Daya Pertanian - Layanan Pengolahan, Pemasaran, dan Usaha Pertanian - Perizinan Pertanian
27	Kehutanan	-	-
28	Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)	-	-
29	Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> - Perizinan Perdagangan Daerah - Layanan Perdagangan Dalam Negeri - Layanan Perdagangan Luar Negeri - Layanan Kerjasama Perdagangan
30	Perindustrian	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> - Perizinan dan Pendataan Industri - Bantuan sarana, prasaranan, permodalan Industri - Penelitian, Pengembangan, Pembinaan dan Penyuluhan Industri - Layanan Industri

No	Fungsi	Perangkat Daerah	Layanan
			- Layanan Kerjasama Industri
31	Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	<ul style="list-style-type: none"> - Layanan Pelatihan dan Produktivitas - Layanan Penempatan dan Perluasan Transmigrasi

3. Arsitektur Sistem Informasi

Berdasarkan Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE, aplikasi di lingkungan Pemerintah Daerah dibagi ke dalam:

a) Aplikasi Umum

Aplikasi Umum merupakan aplikasi yang sama, standar, memiliki fungsi umum dan digunakan secara berbagi pakai untuk keseluruhan unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang, misalnya aplikasi pengelolaan nota dinas, pengadaan, kepegawaian dan lainnya. Aplikasi Umum ini ada yang dikembangkan secara internal dan yang menggunakan aplikasi generik yang berasal dari Pemerintah Pusat atau instansi lain (eksternal), misalnya dari Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk digunakan di lingkup internal Pemerintah Daerah. Berdasarkan Perpres Nomor 95 Tahun 2018, pengembangan dan implementasi Aplikasi Umum akan disesuaikan dengan arahan Arsitektur SPBE Nasional. Pembangunannya dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan pertimbangan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, dengan memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum.

Aplikasi umum ini untuk ke depannya akan ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Untuk Pemerintah Daerah yang tidak menggunakan aplikasi umum, dapat menggunakan aplikasi sejenis dengan aplikasi umum dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Telah mengoperasikan aplikasi sejenis sebelum Aplikasi Umum ditetapkan;
- b. Melakukan kajian biaya dan manfaat terhadap penggunaan dan pengembangan aplikasi sejenis;
- c. Melakukan pengembangan aplikasi sejenis yang disesuaikan dengan Proses Bisnis dan Fungsi pada Aplikasi Umum; dan
- d. Mendapatkan pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika.

b) Aplikasi Khusus

Aplikasi Khusus di lingkup Pemerintah Kabupaten Karawang adalah Aplikasi yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan khusus. Aplikasi khusus dikembangkan secara spesifik untuk memenuhi kebutuhan unit kerja atau perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Karawang. Aplikasi ini umumnya hanya dipakai secara spesifik di suatu unit kerja tertentu. Berdasarkan Perpres Nomor 95 Tahun 2018, pengembangan Aplikasi Khusus dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan pertimbangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus harus memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sesuai arahan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

1. Aplikasi Front Office

Aplikasi front office merupakan aplikasi yang berinteraksi langsung dengan penggunaannya dalam wujud Website resmi Pemerintah Kabupaten Karawang.

Layanan SPBE terdiri atas:

- a) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik, merupakan layanan yang diperuntukkan untuk kebutuhan internal mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Daerah. Realisasi layanan ini diimplementasikan dalam bentuk Portal Administrasi Pelayanan Pemerintah
- b) Layanan publik berbasis elektronik, merupakan Layanan yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di Pemerintah Daerah. Realisasi layanan ini diimplementasikan dalam bentuk Portal Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Karawang

Selain hal tersebut di atas, juga diimplementasikan aplikasi CSIM (Converged Security and Information Management) untuk Command Center. Aplikasi yang termasuk ke dalam kategori ini terdiri dari beberapa kelompok aplikasi sebagai berikut :

No	List Aplikasi Target
1	Nama Aplikasi Website Pemerintah Kabupaten Karawang Jenis Aplikasi Aplikasi Umum Deskripsi/Fitur Website resmi untuk menginformasikan segala hal tentang Kabupaten Karawang (infografis, sejarah, visi dan misi, pemerintahan daerah, berita, dan layanan bagi masyarakat).
2	Nama Aplikasi Portal Administrasi Pemerintahan Jenis Aplikasi Aplikasi Umum Deskripsi/Fitur Portal intranet yang mendukung administrasi pemerintahan di Kabupaten Karawang. Fungsionalitasnya terdiri atas tata naskah dinas secara elektronik, e-message antar pegawai, pengumuman dan berita, integrasi dengan aplikasi kepegawaian (absensi, cuti, SKP, dsb), aplikasi keuangan (SIPKD), aplikasi manajemen kinerja (E-SAKIP) dan aplikasi umum lainnya.
3	Nama Aplikasi Portal Pelayanan Publik Jenis Aplikasi Aplikasi Umum

	<p>Deskripsi/Fitur</p> <p>Portal pelayanan publik yang menyediakan akses perizinan dan pelayanan publik terintegrasi (PTSP) terhadap beberapa kepentingan masyarakat (penanaman modal, perdagangan, perindustrian, perhubungan, dsb). Portal ini mengintegrasikan seluruh aplikasi pelayanan publik yang ada.</p>
4	<p>Nama Aplikasi</p> <p>CSIM (Converged Security and Information Management) – Command Center</p> <p>Jenis Aplikasi</p> <p>Aplikasi Khusus</p> <p>Deskripsi/Fitur</p> <p>CSIM merupakan integrasi dari <i>physical security information management (PSIM)</i> dan <i>IP-based security information management. Physical Security Information Management (PSIM)</i> adalah <i>Security Information & Event Management (SIEM)</i> yang khusus didesain, dikembangkan dan diimplementasikan untuk kebutuhan pengamanan fisik. Sedangkan, <i>IP-based Security Information Management</i> adalah bagaimana mengelola informasi terkait dengan pengamanan <i>IP-based assets</i> termasuk <i>network management devices, firewalls, dan security devices</i> lainnya.</p>

2. Aplikasi Back Office

Aplikasi yang termasuk ke dalam kategori ini terdiri dari beberapa kelompok aplikasi sebagai berikut:

a) Informasi Publik

No	List Aplikasi Target
1	<p>Nama Aplikasi</p> <p>PPID</p> <p>Jenis Aplikasi</p> <p>Aplikasi Umum</p> <p>Deskripsi/Fitur</p> <p>Layanan informasi publik yang mencakup permohonan informasi, penyebarluasan informasi dan pelaporan sebagai bentuk keterbukaan informasi publik.</p>

b) Perizinan Terpadu

No	List Aplikasi Target
1	<p>Nama Aplikasi</p> <p>Sistem Informasi Perizinan PTSP</p> <p>Jenis Aplikasi</p> <p>Aplikasi Umum</p>

	<p>Deskripsi/Fitur</p> <p>Sistem informasi perizinan terintegrasi dengan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS).</p>
--	---

c) Informasi Kebijakan

No		List Aplikasi Target
1	<p>Nama Aplikasi</p> <p>JDIH</p> <p>Jenis Aplikasi</p> <p>Aplikasi Umum</p> <p>Deskripsi/Fitur</p> <p>Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) merupakan wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat. Layanannya meliputi: pencarian produk hukum, daftar peraturan perundangan-undangan terbaru, serta koleksi buku hukum dan peraturan perundang-undangan.</p>	

d) Pengaduan Masyarakat

No		List Aplikasi Target
1	<p>Nama Aplikasi</p> <p>E-LAPOR (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat)</p> <p>Jenis Aplikasi</p> <p>Aplikasi Umum</p> <p>Deskripsi/Fitur</p> <p>Aplikasi penyampaian aspirasi dan pengaduan dari masyarakat terkait banyak hal. Layanan penyampaian aspirasi dan pengaduan masyarakat ini dapat disampaikan melalui aplikasi berbasis web, aplikasi mobile, twitter, SMS dan saluran pengaduan lain yang diintegrasikan. Aplikasi ini telah ditetapkan sebagai Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N). Fungsi-fungsinya antara lain: Penyampaian, Verifikasi, Tindak Lanjut dan Penutupan Laporan serta Fitur Pendukung lainnya.</p>	
2	<p>Nama Aplikasi</p> <p>TANGKAR (Tanggap Karawang)</p> <p>Jenis Aplikasi</p> <p>Aplikasi Umum</p>	

	<p>Deskripsi/Fitur</p> <p>TANGKAR merupakan kanal aduan kemanusiaan bagi masyarakat Kabupaten Karawang yang bisa memberikan solusi atau pertolongan pertama bagi permasalahan yang bersifat kemanusiaan dan darurat. Kanal ini dapat diakses melalui Aplikasi berbasis Android bernama TANGKAR dan media sosial seperti Twitter, Instagram dan Facebook. TANGKAR perlu dikembangkan melalui sistem <i>problem ticketing</i> sehingga memudahkan dalam proses verifikasi dan tindak lanjut laporan yang masuk.</p>
--	--

e) Pengadaan

No	List Aplikasi Target
1	<p>Nama Aplikasi SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik)</p> <p>Jenis Aplikasi Aplikasi Umum</p> <p>Deskripsi/Fitur Aplikasi SPSE merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah). Aplikasi ini digunakan untuk menjembatani antara Panitia Pengadaan di instansi pemerintah dengan penyedia barang/jasa baik melalui proses tender maupun non tender. Keseluruhan proses pengadaan mulai dari pengumuman hingga proses penentuan pemenang dilakukan melalui SPSE ini sehingga transparansi tetap terjaga. SPSE ini juga terintegrasi dengan SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan).</p>
2	<p>Nama Aplikasi SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan)</p> <p>Jenis Aplikasi Aplikasi Umum</p> <p>Kategori Aplikasi Aplikasi Internal Eksisting dari Pemerintah Pusat</p> <p>Deskripsi/Fitur Aplikasi SiRUP merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah). Aplikasi ini digunakan sebagai sarana untuk mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP). SiRUP bertujuan untuk mempermudah pihak Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam mengumumkan RUP-nya. SiRUP ini juga terintegrasi dengan SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik).</p>

f) Perencanaan

No	List Aplikasi Target
1	<p>Nama Aplikasi E-Planning</p> <p>Jenis Aplikasi Aplikasi Umum</p> <p>Deskripsi/Fitur E-Planning merupakan aplikasi yang menjembatani seluruh pihak (Pemimpin Daerah, DPRD, Bappeda, PD/Biro, Kecamatan, Desa dan Masyarakat Umum) untuk mengusulkan program dan kegiatan terkait dengan perencanaan pembangunan.</p>

g) Penganggaran dan Keuangan

No	List Aplikasi Target
1	<p>Nama Aplikasi E-Budgeting</p> <p>Jenis Aplikasi Aplikasi Umum</p> <p>Deskripsi/Fitur E-Budgeting merupakan aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu Pemerintah Kabupaten Karawang untuk meningkatkan efektivitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel. Fitur E-Budgeting antara lain: Modul Anggaran, Modul Penatausahaan, Modul Pertanggungjawaban.</p>

h) Monitoring dan Evaluasi

No	List Aplikasi Target
1	<p>Nama Aplikasi E-Monev</p> <p>Jenis Aplikasi Aplikasi Umum</p> <p>Deskripsi/Fitur E-Monev merupakan aplikasi terintegrasi pelaporan pelaksanaan pembangunan yang efektif, efisien, dan akurat. E-Monev berfungsi sebagai alat bantu PD untuk melakukan self assessment dan self evaluation serta sebagai early warning system terhadap kegiatan yang berpotensi bermasalah.</p>

i) Manajemen Kinerja

No	List Aplikasi Target
1	<p>Nama Aplikasi E-Kinerja</p> <p>Jenis Aplikasi Aplikasi Umum</p> <p>Deskripsi/Fitur E-Kinerja merupakan aplikasi terintegrasi mulai dari proses Perencanaan, Perjanjian, Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja. E-Kinerja bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja. Aplikasi E-Kinerja juga digunakan untuk mempermudah proses penilaian realisasi kinerja PD.</p>

j) Manajemen Aset

No	List Aplikasi Target
1	<p>Nama Aplikasi E-Aset</p> <p>Jenis Aplikasi Aplikasi Umum</p> <p>Deskripsi/Fitur Aplikasi E-Aset merupakan aplikasi yang dikembangkan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan aset di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.</p>

k) Kepegawaian

No	List Aplikasi Target
1	<p>Nama Aplikasi SIMPEG (Sistem Informasi Kepegawaian)</p> <p>Jenis Aplikasi Aplikasi Umum</p> <p>Deskripsi/Fitur Aplikasi SIMPEG ini terintegrasi dengan aplikasi ABSENSI Online. SIMPEG ini akan menyajikan data-data pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang antara lain Data Diri, Keluarga, Pendidikan, Pangkat, Jabatan, dll.</p>

2	<p>Nama Aplikasi PARE (Performance Agreement Report by Electronics)</p> <p>Jenis Aplikasi Aplikasi Umum</p> <p>Deskripsi/Fitur Aplikasi PARE (Performance Agreement Report by Electronics) adalah aplikasi penilaian kinerja pegawai atau Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) untuk memantau dan menilai kinerja pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang. Aplikasi PARE ini terintegrasi dengan aplikasi kehadiran / ABSENSI Online yaitu SIAP (Sistem Informasi Absensi Pegawai) berbasis GPS (Global Positioning System) karena salah satu poin penilaian kinerja pegawai adalah melalui kedisiplinan yang dipantau melalui aplikasi ABSENSI Online. Capaian yang ada di dalam SKP nantinya akan dikonversi menjadi nilai Tunjangan Kinerja Daerah yang akan diterima oleh seluruh pegawai sesuai dengan kinerjanya masing-masing.</p>
3	<p>Nama Aplikasi SIAP (Sistem Informasi Absensi Pegawai) online</p> <p>Jenis Aplikasi Aplikasi Umum</p> <p>Deskripsi/Fitur Aplikasi SIAP (Sistem Informasi Absensi Pegawai) / Absensi Online merupakan aplikasi untuk memantau dan menilai unsur kedisiplinan pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang. Aplikasi Absensi Online ini terintegrasi dengan aplikasi SIMPEG serta PARE. Aplikasi Absensi Online ini dibuat agar dapat melaporkan data kehadiran secara real time bagi seluruh pegawai dengan tiga validasi yaitu posisi koordinat yang sudah ditentukan, selfi face wajah dan approvement dari atasan langsung. Selain itu, aplikasi ini dapat digunakan untuk memantau ketidakhadiran pegawai, baik cuti, izin atau alpa serta mencatat status pegawai yang sedang tugas belajar/ijin belajar atau dinas luar. Absensi Online juga dapat dijadikan dasar yang valid untuk usulan perjalanan dinas pegawai.</p>
4	<p>Nama Aplikasi e-KGB (Kenaikan Gaji Berkala secara elektronik)</p> <p>Jenis Aplikasi Aplikasi Umum</p> <p>Deskripsi/Fitur Aplikasi e-KGB merupakan aplikasi untuk proses pengelolaan data kenaikan gaji berkala pegawai, mulai memunculkan nominatif kandidat yang akan naik gaji berkala, melakukan pengusulan perhitungan dan penetapan Kenaikan Gaji Berkala yang terintegrasi langsung dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.</p>

5	<p>Nama Aplikasi SIPULPENPAKGURU</p> <p>Jenis Aplikasi Aplikasi Umum</p> <p>Deskripsi/Fitur Aplikasi SIPULPENPAKGURU atau Sistem Informasi Pengusulan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Guru merupakan aplikasi untuk proses pengusulan penetapan dan penialaian angka kredit Guru. Prose susulan dilakukan oleh tenaga operator sekolah, sehingga guru dapat memantau melalui tracking usulan sudah sejauh mana proses penerbitan PAK-nya.</p>
6	<p>Nama Aplikasi SIMPAKGURU</p> <p>Jenis Aplikasi Aplikasi Umum</p> <p>Deskripsi/Fitur Aplikasi SIMPAKGURU atau Sistem Informasi Penilaian Angka Kredit Guru merupakan aplikasi untuk mendokumentasikan dan melihat riwayat angka kredit Guru. Aplikasi ini memudahkan bagi Guru untuk mengecek riwayat daftar PAK nya.</p>

l) Pendapatan Daerah

No	List Aplikasi Target
1	<p>Nama Aplikasi SIPBD (Sistem Informnasi Pendapatan dan Belanja Daerah)</p> <p>Jenis Aplikasi Aplikasi Umum</p> <p>Deskripsi/Fitur SIPBD merupakan aplikasi integrasi dari beberapa platform aplikasi terkait dengan pendapatan dan belanja daerah. SIPBD ini juga diharapkan bisa <i>host to host</i> dengan sistem Bank yang ditunjuk.</p>

m) Pengawasan Internal

No	List Aplikasi Target
1	<p>Nama Aplikasi WBS (Whistle Blowing System)</p> <p>Jenis Aplikasi Aplikasi Umum</p>

	<p>Deskripsi/Fitur</p> <p>WBS merupakan aplikasi yang digunakan untuk mengungkap tindakan pelanggaran atau perbuatan melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak bermoral atau perbuatan lain yang dapat merugikan organisasi maupun pemangku kepentingan yang dilakukan oleh pejabat/pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang. Aplikasi ini perlu diwujudkan sebagai bentuk penetapan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bebas dan Melayani (WBBM).</p>
--	---

n) Fungsi Pendidikan

No	List Aplikasi Target
1	<p>Nama Aplikasi</p> <p>PPDB Online</p> <p>Jenis Aplikasi</p> <p>Aplikasi Khusus</p> <p>Deskripsi/Fitur</p> <p>Sistem informasi untuk mendukung proses seleksi peserta didik baru (PDB) untuk jenjang pendidikan SD dan SMP sederajat, mulai dari proses pendaftaran, seleksi, hingga pengumuman seleksi. PPDB Online bersifat daring dan real time. PPDB Online ini juga diharapkan terintegrasi dengan PPDB Provinsi Jawa Barat.</p>
2	<p>Nama Aplikasi</p> <p>Karawang Cerdas</p> <p>Jenis Aplikasi</p> <p>Aplikasi Khusus</p> <p>Deskripsi/Fitur</p> <p>Sistem yang mengintegrasikan seluruh sub sistem yang berkaitan dengan fungsi pendidikan. Karawang Cerdas ini akan menjadi platform pendidikan yang menyeluruh mulai dari proses seleksi peserta didik, database sekolah, database siswa, database tenaga pendidik, sarana prasarana, pemanfaatan dana BOS, permohonan bantuan untuk sekolah, dsb.</p>

o) Fungsi Kesehatan

No	List Aplikasi Target
1	<p>Nama Aplikasi</p> <p>E-Puskesmas</p> <p>Jenis Aplikasi</p> <p>Aplikasi Khusus</p>

	<p>Deskripsi/Fitur</p> <p>Sistem informasi untuk mendukung proses pelayanan kesehatan di Puskesmas sebagai Faskes Tingkat I. Sistem informasi ini juga nantinya akan terintegrasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten dan Dinas Kesehatan Provinsi. Sistem informasi diharapkan tidak hanya menjadi sistem pemberi rujukan secara elektronik namun membantu pengelolaan layanan kesehatan di Puskesmas.</p>
2	<p>Nama Aplikasi</p> <p>Karawang Sehat</p> <p>Jenis Aplikasi</p> <p>Aplikasi Khusus</p> <p>Deskripsi/Fitur</p> <p>Sistem yang mengintegrasikan seluruh sub sistem yang berkaitan dengan fungsi kesehatan. Karawang Sehat ini akan menjadi platform kesehatan yang menyeluruh mulai dari proses pendaftaran layanan kesehatan, pengelolaan rumah sakit dan puskesmas, layanan kesehatan yang dapat diakses via media daring, dsb.</p>

p) Fungsi Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	List Aplikasi Target
1	<p>Nama Aplikasi</p> <p>Sistem Informasi Geografis Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</p> <p>Jenis Aplikasi</p> <p>Aplikasi Khusus</p> <p>Deskripsi/Fitur</p> <p>Sistem informasi geografis untuk mendukung proses pemetaan aset dan fasilitas publik seperti jalan, jembatan, sungai dan tata ruang di lingkungan Kabupaten Karawang.</p>

q) Fungsi Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	List Aplikasi Target
1	<p>Nama Aplikasi</p> <p>Sistem Informasi Geografis Perumahan dan Permukiman</p> <p>Jenis Aplikasi</p> <p>Aplikasi Khusus</p> <p>Deskripsi/Fitur</p> <p>Sistem informasi geografis untuk mendukung proses pemetaan perumahan dan permukiman di lingkungan Jawa Barat.</p>

r) Fungsi Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	List Aplikasi Target
1	<p>Nama Aplikasi Sistem Informasi Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</p> <p>Jenis Aplikasi Aplikasi Khusus</p> <p>Deskripsi/Fitur Sistem informasi untuk mendukung proses perencanaan, pengendalian dan pengawasan terkait ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di lingkungan Kabupaten Karawang.</p>

s) Fungsi Sosial

No	List Aplikasi Target
1	<p>Nama Aplikasi Sistem Informasi Layanan Sosial</p> <p>Jenis Aplikasi Aplikasi Khusus</p> <p>Deskripsi/Fitur Sistem informasi yang mendukung layanan sosial seperti penyuluhan, pengajuan bantuan sosial, pemberantasan kemiskinan, penanggulangan masalah sosial masyarakat, dsb. Sistem ini terintegrasi dengan Portal Pelayanan Publik. Sistem ini juga dilengkapi pemetaan fasilitas sosial secara geospasial.</p>

t) Fungsi Tenaga Kerja

No	List Aplikasi Target
1	<p>Nama Aplikasi Sistem Informasi Penempatan Kerja</p> <p>Jenis Aplikasi Aplikasi Khusus</p> <p>Deskripsi/Fitur Sistem informasi ini untuk mendukung proses administrasi dan perizinan Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS)</p>
2	<p>Nama Aplikasi Sistem Informasi manajemen pelatihan, sertifikasi dan akreditasi kerja</p>

	<p>Jenis Aplikasi Aplikasi Khusus</p> <p>Deskripsi/Fitur Sistem informasi manajemen pelatihan, sertifikasi dan akreditasi kerja untuk mendukung UPT atau Badan pelatihan kerja yang ada untuk kebutuhan para calon tenaga kerja</p>
3	<p>Nama Aplikasi Sistem Informasi Bursa Kerja</p> <p>Jenis Aplikasi Aplikasi Khusus</p> <p>Deskripsi/Fitur Sistem informasi kerja atau bursa kerja untuk daftar lowongan yang tersedia di lingkup area Kabupaten Karawang yang tersedia dan dapat diakses publik</p>

u) Fungsi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	List Aplikasi Target
1	<p>Nama Aplikasi Sistem Informasi Layanan P3A</p> <p>Jenis Aplikasi Aplikasi Khusus</p> <p>Deskripsi/Fitur Sistem informasi pendukung layanan P3A, misalnya untuk penyuluhan, pengaduan dll</p>

v) Fungsi Pangan

No	List Aplikasi Target
1	<p>Nama Aplikasi Sistem Informasi Ketahanan Pangan</p> <p>Jenis Aplikasi Aplikasi Khusus</p> <p>Deskripsi/Fitur Sistem informasi untuk meningkatkan ketahanan pangan masyarakat Kabupaten Karawang</p>

w) Fungsi Lingkungan Hidup

No	List Aplikasi Target
1	<p>Nama Aplikasi Karawang Lestari</p> <p>Jenis Aplikasi Aplikasi Khusus</p> <p>Deskripsi/Fitur Karawang Lestari merupakan platform aplikasi yang berkaitan dengan lingkungan hidup.</p>

x) Fungsi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	List Aplikasi Target
1	<p>Nama Aplikasi Sistem Informasi Dukcapil Terintegrasi Kabupaten Karawang</p> <p>Jenis Aplikasi Aplikasi Khusus</p> <p>Deskripsi/Fitur Sistem Informasi Dukcapil terintegrasi dengan keseluruhan Kecamatan di Kabupaten Karawang</p>

y) Fungsi Pemberdayaan Masyarakat & Desa

No	List Aplikasi Target
1	<p>Nama Aplikasi e-Desa</p> <p>Jenis Aplikasi Aplikasi Khusus</p> <p>Deskripsi/Fitur Sistem informasi untuk layanan dan informasi desa yang dapat digunakan untuk melayani masyarakat untuk seluruh layanan publik terkait desa dan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk layanan internal desa</p>

z) Fungsi Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	List Aplikasi Target
1	<p>Nama Aplikasi Sistem Informasi Pengendalian Penduduk dan Pengawasan KB</p> <p>Jenis Aplikasi Aplikasi Khusus</p>

	<p>Deskripsi/Fitur</p> <p>Sistem informasi untuk pengendalian penduduk dan pengawasan KB yang terintegrasi dengan data Dukcapil Pemerintah Kabupaten Karawang</p>
2	<p>Nama Aplikasi</p> <p>Sistem Informasi Layanan KB Masyarakat</p> <p>Jenis Aplikasi</p> <p>Aplikasi Khusus</p> <p>Deskripsi/Fitur</p> <p>Sistem Informasi layanan terkait KB untuk masyarakat umum menyediakan informasi KB, layanan terkait KB secara online</p>

aa) Fungsi Perhubungan

No	List Aplikasi Target
1	<p>Nama Aplikasi</p> <p>Karawang Terhubung</p> <p>Jenis Aplikasi</p> <p>Aplikasi Khusus</p> <p>Deskripsi/Fitur</p> <p>Pengembangan sistem informasi transportasi, e-payment dan lalu lintas yang terintegrasi dengan Command Center</p>

bb) Fungsi Koperasi dan UKM

No	List Aplikasi Target
1	<p>Nama Aplikasi</p> <p>Sistem Informasi Perizinan KUKM</p> <p>Jenis Aplikasi</p> <p>Aplikasi Umum</p> <p>Deskripsi/Fitur</p> <p>Sistem Informasi Perizinan KUKM, mengelola perizinan KUKM dengan integrasi antara PTSP dengan dinas KUKM</p>

cc) Fungsi Penanaman Modal

No	List Aplikasi Target
1	<p>Nama Aplikasi</p> <p>Sistem Informasi Perizinan PTSP</p> <p>Jenis Aplikasi</p> <p>Aplikasi Umum</p>

	<p>Deskripsi/Fitur</p> <p>Sistem informasi perizinan terintegrasi dengan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Karawang yang terintegrasi dengan Online Single Submission (OSS).</p>
--	---

dd) Fungsi Kepemudaan dan Olah Raga

No	List Aplikasi Target
1	<p>Nama Aplikasi</p> <p>Aplikasi Database Kepemudaan dan Olahraga</p> <p>Jenis Aplikasi</p> <p>Aplikasi khusus</p> <p>Deskripsi/Fitur</p> <p>Aplikasi Database Kepemudaan dan Olahraga, merupakan aplikasi yang mengelola data potensi, kepeloporan, organisasi, sarana dan prasana serta sumber daya kepemudaan dan olah raga di lingkup Kabupaten Karawang</p>

ee) Statistik

No	List Aplikasi Target
1	<p>Nama Aplikasi</p> <p>Satu Data Karawang</p> <p>Jenis Aplikasi</p> <p>Aplikasi Umum</p> <p>Deskripsi/Fitur</p> <p>Satu Data merupakan sebuah sistem yang berfungsi sebagai media kompilasi, pengolahan dan penyajian data pembangunan yang terintegrasi antar PD Kabupaten Karawang.</p>

ff) Fungsi Kebudayaan

No	List Aplikasi Target
1	<p>Nama Aplikasi</p> <p>Portal/ Sistem Informasi Kebudayaan & Seni</p> <p>Jenis Aplikasi</p> <p>Aplikasi khusus</p> <p>Deskripsi/Fitur</p> <p>Portal sistem informasi kebudayaan & seni sebagai media informasi terkait kebudayaan dan seni Kabupaten Karawang, informasi event kesenian dan budaya dan komunitas seni/budaya, terintegrasi dengan website Kabupaten Karawang</p>

gg) Fungsi Perpustakaan & Arsip

No	List Aplikasi Target
1	<p>Nama Aplikasi E-Library</p> <p>Jenis Aplikasi Aplikasi Khusus</p> <p>Deskripsi/Fitur Sistem Informasi untuk layanan dan manajemen perusahaan daerah untuk mengelola layanan perpustakaan untuk pelanggan/ masyarakat dan pengelolaan pustaka perpustakaan</p>
2	<p>Nama Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Daerah</p> <p>Jenis Aplikasi Aplikasi Khusus</p> <p>Deskripsi/Fitur Sistem informasi untuk melakukan pengelolaan manajemen arsip dan naskah dinas daerah</p>

hh) Fungsi Komunikasi dan Informatika

Khusus untuk fungsi pengelolaan TI yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, dapat didetailkan sebagai berikut:

Aplikasi terkait Fungsi Tata Kelola TI

No	List Aplikasi
1	<p>Nama Aplikasi Aplikasi Perencanaan TI/Arsitektur Enterprise</p> <p>Jenis Aplikasi Aplikasi Khusus</p> <p>Deskripsi/Fitur Aplikasi Sistem Perencanaan TI/ Arsitektur Enterprise adalah aplikasi yang digunakan untuk melakukan proses perencanaan dan penyusunan arsitektur sistem dan teknologi informasi yang meliputi arsitektur bisnis, data, aplikasi dan teknologi. Pada aplikasi ini dikelola arsitektur existing dan target yang akan diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan bisnis organisasi.</p>
2	<p>Nama Aplikasi Aplikasi Audit TI</p> <p>Jenis Aplikasi Aplikasi Khusus</p> <p>Deskripsi/Fitur</p>

	<p>Aplikasi Audit TI adalah aplikasi yang digunakan untuk membantu pelaksanaan audit TI dilingkungan Kominfo dan Instansi lainnya di Pemprov Jabar. Aplikasi Audit TI juga menyimpan dan mengelola data hasil pelaksanaan audit sebagai dokumentasi dan dapat digunakan sebagai referensi untuk evaluasi terhadap pengembangan layanan TI untuk masa depan.</p>
3	<p>Nama Aplikasi Aplikasi Manajemen Proyek TI</p> <p>Jenis Aplikasi Aplikasi Khusus</p> <p>Deskripsi/Fitur Aplikasi Sistem Manajemen Proyek TI adalah aplikasi yang digunakan untuk melakukan pengelolaan project-project di lingkungan Kominfo Jabar khususnya project-project pengembangan system dan teknologi informasi.</p>
4	<p>Nama Aplikasi Pengelolaan Pengembangan Sistem</p> <p>Jenis Aplikasi Aplikasi Khusus</p> <p>Deskripsi/Fitur Aplikasi pengelolaan pengembangan sistem merupakan aplikasi untuk mengelola pengembangan sistem dan teknologi informasi baik pengembangan aplikasi software maupun infrastruktur.</p>

Aplikasi terkait Fungsi Pengelolaan Infrastruktur TI

No	List Aplikasi
1	<p>Nama Aplikasi Aplikasi Manajemen Layanan TI (IT Service Management)</p> <p>Jenis Aplikasi Aplikasi Khusus</p> <p>Deskripsi/Fitur Aplikasi manajemen layanan TI atau IT Service Management merupakan aplikasi untuk mengelola keseluruhan proses terkait pengelolaan layanan TI organisasi. Aplikasi manajemen layanan TI ini umumnya mengakomodasi best practices pengelolaan layanan TI dari beberapa standard dan framework yang sudah teruji seperti ITIL dan ISO 20000.</p>
2	<p>Nama Aplikasi Virtualization Management</p> <p>Jenis Aplikasi Aplikasi Khusus</p>

	<p>Deskripsi/Fitur</p> <p>Virtualition Management merupakan aplikasi yang digunakan untuk melakukan manajemen virtualisasi sumber daya server farm yang dimiliki organisasi. Tujuan dari virtualization management adalah memastikan virtual machines dapat menyediakan layanan dan menjamin performansi operasi komputasi berjalan sesuai dengan yang diinginkan.</p>
3	<p>Nama Aplikasi</p> <p>Storage Management</p> <p>Jenis Aplikasi</p> <p>Aplikasi Khusus</p> <p>Deskripsi/Fitur</p> <p>Managemen penyimpanan menyediakan informasi real-time dan histori informasi infrastruktur storage terkait ketersediaan, kapasitas dan kinerja, manajemen perangkat, penentuan masalah, perencanaan konfigurasi dan manajemen perubahan.</p>
4	<p>Nama Aplikasi</p> <p>Application Performance Management</p> <p>Jenis Aplikasi</p> <p>Aplikasi Khusus</p> <p>Deskripsi/Fitur</p> <p>Layanan yang berfungsi untuk memantau dan mengelola kinerja dan ketersediaan aplikasi perangkat lunak. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan user experience yang memuaskan untuk pengguna jasa. Oleh karena itu interaksi antara pengguna dan transaksi bisnis dipantau dan dianalisis sampai ke tingkat kode program untuk memberikan penilaian yang dapat ditindaklanjuti. Platform APM modern secara otomatis mengenali lingkungan aplikasi secara end-to-end dan memanfaatkan dynamic baselining, menyelesaikan masalah kinerja sebelum pelanggan terkena dampak dari masalah tersebut.</p>
5	<p>Nama Aplikasi</p> <p>Network Management System (NMS)</p> <p>Jenis Aplikasi</p> <p>Aplikasi Khusus</p> <p>Deskripsi/Fitur</p> <p>Network Monitoring System (NMS) merupakan tool untuk melakukan monitoring/pengawasan pada elemen-elemen dalam jaringan komputer. Fungsi dari NMS adalah melakukan pemantauan terhadap kualitas SLA (Service Level Agreement) dari sumber daya yang digunakan. Hasil dari pantauan tersebut biasanya dijadikan bahan dalam pengambilan keputusan oleh pihak manajemen, disisi lain digunakan oleh administrator jaringan (technical person) untuk menganalisis apakah terdapat kejanggalan dalam operasi jaringan.</p>

6	<p>Nama Aplikasi Cloud Management System</p> <p>Jenis Aplikasi Aplikasi Khusus</p> <p>Deskripsi/Fitur Cloud management bertujuan untuk mengelola produk dan layanan cloud computing. Diperlukan Platform yang menyediakan fungsi cloud management sebagai mengintegrasikan produk-produk yang menyediakan layanan pengelolaan untuk lingkungan cloud public, cloud private, dan cloud hybrid.</p>
7	<p>Nama Aplikasi Facilities Management</p> <p>Jenis Aplikasi Aplikasi Khusus</p> <p>Deskripsi/Fitur Facilities management merupakan aplikasi yang digunakan untuk mengelola fasilitas khususnya fasilitas teknologi informasi yang dimiliki organisasi. Membuat kesepakatan dengan pemasok jasa untuk mengelola fasilitas perusahaan internal seperti telekomunikasi atau layanan pengolahan data. Pengelolaan fasilitas tidak melibatkan pemindahan kepemilikan fasilitas ke penyedia layanan</p> <p>Bagi instansi pemerintah, manajemen fasilitas adalah jenis hubungan kontrak dimana vendor bertanggung jawab atas satu atau lebih teknologi informasi (TI). Tidak seperti outsourcing, konsep manajemen fasilitas mengacu pada vendor yang mengoperasikan dan mengelola aset (biasanya perangkat keras dan perangkat lunak), namun tidak mengambil kepemilikan. Dalam kesepakatan yang dimiliki oleh kontraktor yang dioperasikan kontraktor, pemerintah memiliki peralatan dan sistem operasi, dan kontraktor mengoperasikan peralatan tersebut dengan personilnya. Biasanya peralatan tersebut dipelihara di fasilitas pemerintah, namun bisa berada di fasilitas milik vendor.</p>
8	<p>Nama Aplikasi IT Asset Management</p> <p>Jenis Aplikasi Aplikasi Khusus</p> <p>Deskripsi/Fitur Merupakan aplikasi yang mengelola asset TI baik yang direncanakan maupun yang sudah dioperasikan. Identifikasi vendor dan support yang ada, penentuan service level terkait Aset, Pemanfaatannya dan Monitoring Operasionalnya.</p>

9	<p>Nama Aplikasi Server, Desktop, Mobile Device Management & Security</p> <p>Jenis Aplikasi Aplikasi Khusus</p> <p>Deskripsi/Fitur Dalam sebuah instansi yang terdiri dari banyak entitas di dalamnya pasti akan didukung dengan perangkat keras sebagai sarana penunjang aktifitas sehari-hari. Tujuan dari platform ini adalah membantu dalam memmanage perangkat keras yang dipegang oleh individu dalam berbagai macam jenis dan spesifikasi serta kebutuhan yang berbeda-beda.</p>
---	--

Aplikasi terkait Fungsi Persandian dan Keamanan Informasi

No	List Aplikasi
1	<p>Nama Aplikasi Sistem Informasi Pengendalian Persandian dan Keamanan Informasi</p> <p>Jenis Aplikasi Aplikasi Khusus</p> <p>Deskripsi/Fitur Aplikasi Sistem Informasi Pengendalian Persandian dan Keamanan Informasi Kabupaten Karawang, merupakan aplikasi yang digunakan untuk lakukan pengelolaan dan pengendalian persandian dan keamanan informasi yang didalamnya melingkupi penyediaan layanan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan Sertifikat Elektronik - Pengelolaan Sumber Daya Persandian dan Keamanan Informasi - Monitoring dan Evaluasi Persandian dan Keamanan Informasi - Pelayanan dan Konsultasi Persandian dan Keamanan Informasi. - Monitoring Sistem Elektronik Perangkat Daerah - Help Desk Layanan Persandian dan Keamanan Informasi
2	<p>Nama Aplikasi Aplikasi Security Audit TI</p> <p>Jenis Aplikasi Aplikasi Khusus</p>

	<p>Deskripsi/Fitur</p> <p>Aplikasi Security Audit TI adalah aplikasi yang digunakan untuk membantu pelaksanaan audit keamanan TI di lingkungan Kominfo dan Instansi lainnya di Pemprov Jabar. Aplikasi Security Audit TI juga menyimpan dan mengelola data hasil pelaksanaan audit sebagai dokumentasi dan dapat digunakan sebagai referensi untuk evaluasi terhadap pengembangan layanan TI khususnya untuk aspek keamanan layanan TI untuk masa depan.</p>
3	<p>Nama Aplikasi</p> <p>Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Sertifikasi Elektronik</p> <p>Jenis Aplikasi</p> <p>Aplikasi Khusus</p> <p>Deskripsi/Fitur</p> <p>Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Sertifikasi Elektronik merupakan aplikasi yang digunakan untuk mengelola pemanfaatan sertifikasi elektronik untuk setiap user atau personil pengguna layanan sistem informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang. Aplikasi ini akan menyediakan public key infrastructure (PKI) untuk mendukung layanannya. Aplikasi ini akan terkoneksi dengan master data personil di seluruh perangkat daerah yang sumber datanya berasal dari SIMPEG (Sistem Informasi Kepegawaian) di BKD (Badan Kepegawaian Daerah). Nantinya setelah aplikasi ini berjalan, semua sistem informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang akan terintegrasi dan mengakses sistem informasi Pengelolaan Sertifikasi Elektronik ini.</p>

ii) Fungsi Kelautan Dan Perikanan

No	List Aplikasi Target
1	<p>Nama Aplikasi</p> <p>Aplikasi Kelola dan Jual Beli Ikan</p> <p>Jenis Aplikasi</p> <p>Aplikasi Khusus</p> <p>Deskripsi/Fitur</p> <p>Sistem informasi untuk pengelolaan perikanan dan jual beli ikan</p>

jj) Fungsi Pariwisata

No	List Aplikasi Target
1	<p>Nama Aplikasi</p> <p>Karawang Peleisir</p> <p>Jenis Aplikasi</p> <p>Aplikasi Khusus</p>

	<p>Deskripsi/Fitur</p> <p>Digitalisasi pelayanan pariwisata melalui penyempurnaan customer experience, business operation dan new business model. Pemanfaatan platform ini untuk pengelolaan ekosistem pariwisata di Kabupaten Karawang</p>
--	--

kk) Fungsi Pertanian

No	List Aplikasi Target
1	<p>Nama Aplikasi</p> <p>Karawang Irigasi</p> <p>Jenis Aplikasi</p> <p>Aplikasi Khusus</p> <p>Deskripsi/Fitur</p> <p>Sistem informasi untuk pengelolaan irigasi pertanian secara smart dengan dukungan teknologi terkait</p>
2	<p>Nama Aplikasi</p> <p>Sistem Informasi Pengawasan dan Pengendalian Pertanian</p> <p>Jenis Aplikasi</p> <p>Aplikasi Khusus</p> <p>Deskripsi/Fitur</p> <p>Sistem informasi untuk pengawasan dan pengendalian pertanian dengan dukungan SIG yang terintegrasi dengan instansi terkait</p>

ll) Fungsi Perdagangan

No	List Aplikasi Target
1	<p>Nama Aplikasi</p> <p>Karawang Pasar</p> <p>Jenis Aplikasi</p> <p>Aplikasi Umum</p> <p>Deskripsi/Fitur</p> <p>Karawang Pasar kerjasama dengan Bukalapak atau Tokopedia, kerjasama dengan PD lain dalam bentuk penyediaan marketplace. UKM diarahkan untuk membuka lapak di Karawang Pasar seperti Bukalapak atau Tokopedia</p>

mm) Fungsi Perindustrian

No	List Aplikasi Target
1	<p>Nama Aplikasi</p> <p>Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk Perizinan Perindustrian</p>

	<p>Jenis Aplikasi Aplikasi Umum</p> <p>Deskripsi/Fitur Sistem informasi untuk mengelola perizinan terpadu pada layanan satu atap di Dinas PMPTSP (Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu). Pengembangan ke depan diintegrasikan dengan aplikasi terkait di Kementerian Perindustrian.</p>
--	---

nn) Fungsi Transmigrasi

No	List Aplikasi Target
1	<p>Nama Aplikasi Sistem Informasi layanan administrasi transmigrasi</p> <p>Jenis Aplikasi Aplikasi Khusus</p> <p>Deskripsi/Fitur Sistem Informasi untuk pengelolaan administrasi transmigrasi untuk calon transmigran untuk memudahkan proses administrasi</p>
2	<p>Nama Aplikasi Sistem Informasi Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi Transmigran</p> <p>Jenis Aplikasi Aplikasi Khusus</p> <p>Deskripsi/Fitur Sistem informasi manajemen pelatihan, dan peningkatan kompetensi dengan pengetahuan dan skill untuk para calon transmigran</p>

oo) Fungsi Tambahan

No	List Aplikasi Target
1	<p>Nama Aplikasi Video Conference</p> <p>Jenis Aplikasi Aplikasi Umum</p> <p>Deskripsi/Fitur Video Conference merupakan aplikasi umum yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan kegiatan rapat secara jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi kamera. Video Conference dapat dimanfaatkan dan menjadi alternatif solusi bagi Pimpinan Daerah maupun Pimpinan Perangkat Daerah yang akan berkoordinasi dengan jajarannya untuk membahas isu-isu krusial namun dibatasi oleh ruang.</p>

2	<p>Nama Aplikasi Pengelolaan Nota Dinas</p> <p>Jenis Aplikasi Aplikasi Umum</p> <p>Deskripsi/Fitur Aplikasi Pengelolaan Nota Dinas merupakan aplikasi wajib yang harus dimiliki oleh seluruh instansi pemerintah terkait dengan tata naskah dinas, pencatatan surat masuk dan keluar, disposisi surat, dsb. Pengelolaan nota dinas haruslah memenuhi standar yang telah ditetapkan.</p>
---	--

3. Platform Integrasi atau Saluran Penghubung

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 penggunaan Sistem Penghubung Layanan pemerintah bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan integrasi antar Layanan SPBE. Setiap Pemerintah Daerah harus menggunakan Sistem Penghubung Layanan pemerintah dalam mengintegrasikan seluruh aplikasi yang ada. Dalam menggunakan Sistem Penghubung Layanan, Pemerintah Daerah harus:

- a. Membuat keterhubungan dan akses Jaringan Intra Pemerintah Daerah dengan Jaringan Intra Pemerintah;
- b. Memenuhi standar interoperabilitas antar Layanan SPBE;
- c. Mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika
- d. Mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara)

Sistem Penghubung Pemerintah Daerah ini di masa depan pemanfaatannya harus dapat digunakan untuk keseluruhan PD dan seluruh Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.

4. Data Warehouse & Analytical

a. Data Warehouse

Data Warehouse merupakan suatu sistem yang terdiri dari elemen data operasional, data staging, data presentasi, dan query tool, di mana data staging mengambil data historikal dari berbagai data operasional internal atau data eksternal organisasi, yang selanjutnya dipresentasikan dalam bentuk data dimensional sehingga dapat disajikan ke pengguna (manajemen) dalam bentuk database multidimensi yang sangat bermanfaat untuk membantu mendukung sistem pengambilan keputusan.

Konsep utama data warehouse adalah data yang disimpan untuk keperluan analisis akan lebih efektif untuk diakses apabila memisahkannya dengan data untuk keperluan sistem operasional. Sumber data sistem operasional pada umumnya memelihara data masa lalu dalam jumlah yang sedikit, sedangkan data warehouse akan menyimpan data masa lalu dalam jumlah yang sangat besar. Hal ini karena data warehouse digunakan untuk menganalisis bisnis atau proses kerja berdasarkan data masa lalu.

b. Aplikasi Analitik/Sistem Informasi Eksekutif

Aplikasi Sistem Informasi Eksekutif atau EIS (Executive Information System), merupakan aplikasi yang digunakan oleh pihak manajemen atau jajaran pimpinan untuk mempermudah proses pengambilan keputusan secara komprehensif dan terintegrasi. Aplikasi EIS ini didukung oleh sumber informasi yang terdapat di berbagai aplikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang. Aplikasi ini dikembangkan secara customized.

4. Arsitektur Infrastruktur

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan maka perencanaan arsitektur infrastruktur untuk di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang adalah sebagai berikut:

- a) Penataan Jaringan LAN dan WAN
- b) Pembangunan dan Pengembangan Ruang Server
- c) Penyusunan Disaster Recovery Plan
- d) Pembangunan dan Pengembangan Command Center
- e) Pembangunan dan Pengembangan Call Center
- f) Pembangunan dan Pengembangan Video Conference
- g) Pembangunan dan Pengembangan Security Operation Center

Nama Program	Penataan jaringan LAN dan WAN
Deskripsi	Topologi jaringan adalah susunan berbagai elemen seperti link, node, dan lain-lain dari sebuah jaringan komputer. Pada dasarnya struktur topologi jaringan dapat digambar secara fisik atau logis. Topologi fisik adalah penempatan berbagai komponen jaringan termasuk lokasi perangkat dan instalasi kabel, sedangkan topologi logis menggambarkan bagaimana data mengalir dalam jaringan, terlepas dari rancangan fisiknya. Jarak antara node, interkoneksi fisik, tingkat transmisi atau jenis sinyal mungkin berbeda antara dua jaringan, namun topologi jaringan mungkin identik.

<p>Desain Topologi</p>	
<p>Standar Acuan</p>	<p>3 Tier Network</p>
<p style="text-align: center;">Spesifikasi Kebutuhan Fungsional</p>	
<p>1</p>	<p>Reliability yaitu kemampuan yang andal dan secara konsisten tetap berfungsi sesuai spesifikasi untuk jangka waktu yang lama, minimal 10 tahun untuk perangkat sistem komputer dan keamanan jaringan</p>
<p>2</p>	<p>Sustainable yaitu pembangunan sistem komputer dan keamanan jaringan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan informasi teknologi masa mendatang dan bersifat berkelanjutan</p>
<p>3</p>	<p>Availability yaitu ketersediaan layanan sesuai spesifikasi dan konfigurasi sistem harus mengarah pada konsep High Availability (HA). Selain spesifikasi perangkat, diperlukan juga dukungan berupa link cadangan untuk setiap komponen dalam jaringan. Dalam roadmap ini digambarkan bahwa selain koneksi yang disediakan langsung dari Diskominfo, masing-masing Dinas, PD, UPTD juga dimungkinkan untuk memiliki koneksi yang dikelola secara mandiri, atau terlepas dari Diskominfo</p>
<p>4</p>	<p>Scalability yaitu kemampuan untuk dapat dikembangkan sesuai kebutuhan pada masa mendatang tanpa melakukan perubahan mendasar atau prinsip</p>
<p>5</p>	<p>Manageability yaitu kemampuan untuk bisa dikelola dengan mudah melalui single console dalam situasi dimana terjadi perubahan konfigurasi dan kebijakan (policy)</p>

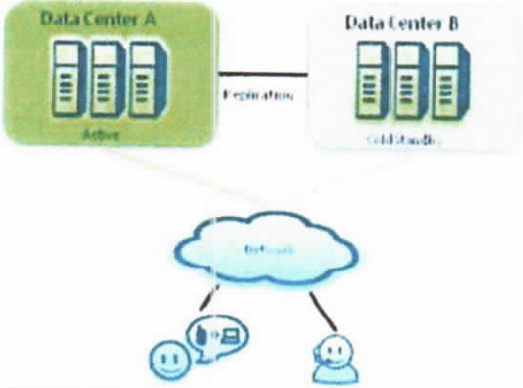
Spesifikasi Kebutuhan Teknis	
1	<p>Internet Router</p> <p>Internet Router merupakan perangkat yang menghubungkan jaringan data dengan Public Internet. Kriteria dan ketentuan untuk internet router sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Secure routing, dual fungsi sebagai router dan firewall b. Memiliki fitur lengkap layer 3 tanpa memerlukan tambahan lisensi c. Memiliki network connectivity yang beragam dan sudah mendukung gigabit port d. Fleksibilitas antarmuka untuk memenuhi kebutuhan network dari berbagai jenis e. Mempunyai kemampuan High Availability (HA)
2	<p>WAN Router</p> <p>WAN Router merupakan perangkat yang menghubungkan jaringan local area network (LAN) Data Center dengan jaringan local area network (LAN) Mitra PD, UPTD, RSUD dan Sekolah yang tercakup dalam Closed Network. Kriteria dan ketentuan untuk WAN Router sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki fungsi control dan forwarding terpisah sehingga unjuk kerja router tidak mengalami degradasi. b. Memiliki fitur lengkap layer 3 tanpa memerlukan tambahan lisensi c. Mendukung cloud computing d. Memiliki network connectivity yang beragam dan sudah mendukung gigabit port e. Fleksibilitas antarmuka untuk memenuhi kebutuhan network dari berbagai jenis f. Mempunyai kemampuan High Availability (HA)
3	<p>Firewall</p> <p>Firewall merupakan perangkat network security yang menghubungkan router dengan core switch. Firewall adalah sebuah sistem atau perangkat yang mengizinkan lalu lintas jaringan yang dianggap aman untuk melaluinya dan mencegah lalu lintas jaringan yang tidak aman. Fungsi Internet Firewall adalah untuk mengontrol akses terhadap siapa saja yang memiliki akses terhadap jaringan pribadi dari pihak luar ataupun pencuri data lainnya. Kriteria dan ketentuan untuk firewall sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Router kelas enterprise yang diimplementasikan untuk large enterprise data centers, public sector network dan service provider b. Memberikan perlindungan yang komprehensif termasuk multi gigabit firewall, security intelligence dan unified threat management c. Memiliki network connectivity yang beragam dan sudah mendukung 1 GbE, 10 GbE, 40 GbE, 100GbE port d. Memiliki fitur lengkap layer 3 tanpa memerlukan tambahan lisensi e. Kinerja terukur (scalable performance) berdasarkan arsitektur dinamis TIK

	<ul style="list-style-type: none"> f. Mempunyai kemampuan High Availability g. Mempunyai kemampuan segmentasi jaringan seperti VLAN, Security Zone, Virtual Router dan lainnya sehingga level keamanan bisa disesuaikan dan memudahkan dalam membuat kebijakan jaringan untuk berbagai hal seperti internal, eksternal dan DMZ
4	<p>Core Switch Core Switch merupakan central node dalam jaringan. Kriteria dan ketentuan untuk core switch Data Center sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Scalability modular chasis b. Mendukung teknologi virtual chasis dan stacking c. Berbasis layer 2 atau layer 3 tanpa limitasi lisensi dan fitur d. Mendukung 10GbE, 40 GbE dan 100GbE port e. Mendukung data center interconnect f. Mempunyai kemampuan High Availability g. Mempunyai certificate ROHS, WEEE dan lainnya
5	<p>Network Management Network Management merupakan pengelola kondisi dan perilaku jaringan area lokal (LAN). Kriteria dan ketentuan untuk network management sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Menggabungkan, menganalisis dan mengelola perilaku unparallel dan anomali b. Mengawasi data network, peristiwa keamanan, profil vulnerability dan informasi ancaman c. Penyebaran sederhana dan dapat diimplementasikan secara cepat d. Seluruh fungsi dan kerja network management dikelola melalui satu konsol (single console)
6	<p>Network Performance Monitor Network Performance Monitor merupakan pengelola kondisi dan perilaku akses ke aplikasi berbasis web. Kriteria dan ketentuan untuk network performance monitor sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan pelayanan terhadap akses ke aplikasi berbasis web b. Menyediakan visibilitas terhadap lalu lintas trafik jaringan c. Menyediakan informasi unjuk kerja aplikasi atau layanan dan jaringan melalui tampilan dashboard berbasis web d. Mempunyai kemampuan peringatan dini (early alert) bila ada penurunan performa pada jaringan dan layanan TIK e. Membantu menemukan root cause pada permasalahan yang terjadi pada aplikasi atau layanan.

7	<p>Server Load Balancer</p> <p>Server Load Balancer adalah aplikasi pengiriman controller dan penyeimbang beban yang menjamin aplikasi SLA. Server load balancer memberikan kemampuan penyeimbang beban pada lokal dan global untuk semua web, cloud dan aplikasi berbasis mobile. Kriteria dan ketentuan untuk server load balancer sebagai berikut ;</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki virtual ADC b. Isolasi antara virtual ADC antara jaringan, kesalahan dan tingkat konfigurasi c. Pemutakhiran layanan dapat diaktifkan tanpa mempengaruhi kinerja aplikasi layanan lainnya d. Mendukung jaringan IPv6
---	---

Nama Program	Pembangunan dan Pengembangan Ruang Server
Deskripsi	<p>Pemerintah Kabupaten Karawang perlu melaksanakan pembangunan prasarana berupa ruang server dan sarana pendukung yang berfungsi sebagai pusat operasi bagi keseluruhan Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Karawang. Pembangunan dan pengembangan ruang server merupakan wujud pengembangan TI yang berkelanjutan (sustainable) dan perlu mengadopsi tren teknologi terkini.</p>
Spesifikasi Kebutuhan Fungsional	
Standar	TIA 942 – Tier II
Spesifikasi Kebutuhan Teknis	
1	<ol style="list-style-type: none"> a. Konsep Arsitektural b. Konsep Sistem Elektrikal c. Konsep Sistem Keamanan, Monitoring dan Manajemen d. Konsep Sistem Rack dan Pengkabelan Data

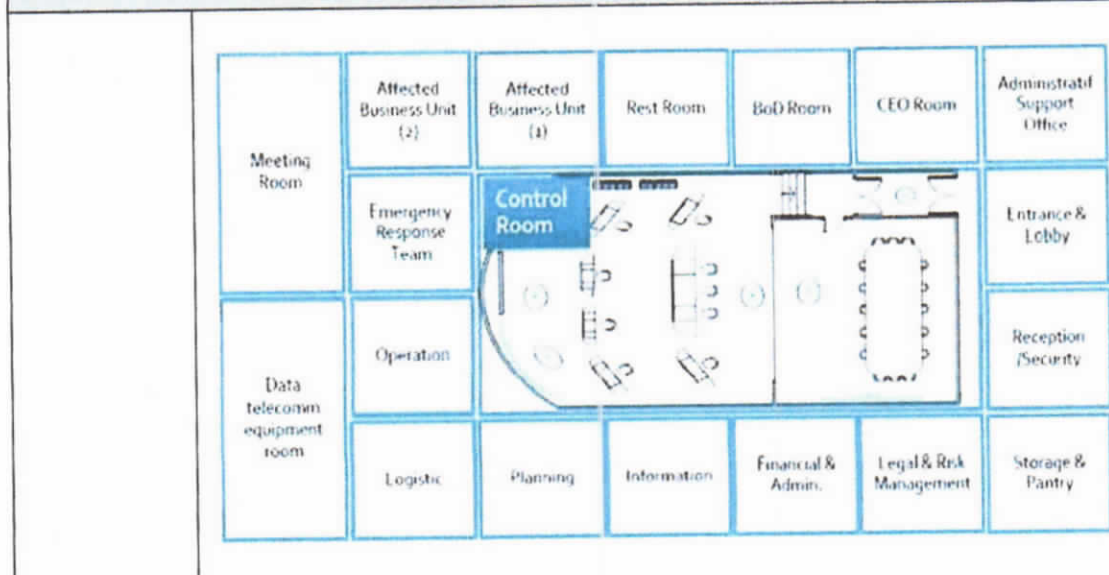
	<ul style="list-style-type: none"> e. Konsep Sistem Tata Udara f. Konsep Sistem Deteksi dan Pemadam Kebakaran g. Konsep Desain Sistem Jaringan (Network) h. Konsep Desain Sistem Server & storage i. Konsep Virtualisasi dan Konsep Government Cloud Service
--	---

Nama Program	Penyusunan Disaster Recovery Plan
Deskripsi	<p>Keberlanjutan aktivitas merupakan alasan utama, disamping itu Pemerintah Indonesia juga telah mengeluarkan peraturan terutama untuk institusi yang melakukan transaksi elektronik wajib untuk melakukan pencadangan pada data center yang lokasinya berjarak minimal 35 KM dari data center internal di instansi. Terutama untuk instansi yang memiliki cakupan layanan luas secara demografi dengan kantor pusat sebagai pusat operasional sistem informasi, tentu sangat riskan jika tidak memiliki rencana pemulihan bencana sebagai kebijakan strategis kelangsungan organisasi (<i>Business Contingency Plan dan Business Continuity Plan</i>). Sehingga jika terjadi suatu bencana seperti kebakaran, korsleting listrik di data center internal, tim TI dapat mengalihkan seluruh aktivitas operasi ke co-location data center di luar lokasi institusi untuk sementara waktu. Disinilah pentingnya sebuah data center di luar lingkungan institusi pusat untuk persiapan menghadapi bencana.</p>
Spesifikasi Kebutuhan Fungsional	
	
Standar Acuan	ISO/IEC 24762:2008
Spesifikasi Kebutuhan Teknis	
<p>Perencanaan Keberlangsungan Pemrosesan Data adalah menentukan proses backup atau alternatif pemrosesan data saat terjadinya bencana yang menginterupsi aplikasi bisnis yang berjalan. Berikut adalah strategi yang dapat dipilih dalam menentukan alternatif data processing saat terjadi bencana:</p>	
Duplication	Melakukan duplikasi terhadap fasilitas proses informasi

Hot sites	Sepenuhnya dijalankan oleh fasilitas operasi dan data alternatif yang dilengkapi dengan perangkat keras dan perangkat lunak yang memadai selama dampak bencana masih berlangsung. Cara ini penting untuk aplikasi yang critical, namun biayanya sangat mahal.
Warm site	Fasilitas alternatif yang memiliki sarana yang lebih sedikit. Misalnya ada listrik, jaringan, telepon, meja-meja, printer, tetapi tanpa komputer yang mahal. Kadang-kadang ada komputer, tetapi less processing power.
Cold site	Fasilitas yang memiliki prasarana penunjang untuk operasi komputer, misalnya ruangan yang memiliki listrik dan AC meskipun belum ada komputernya, namun siap dipasang perangkat komputasi
Mutual aid agreement	Perjanjian dengan instansi lain (<i>mutual aid agreement</i>), yaitu bekerja sama dengan instansi lain yang memiliki kebutuhan sistem komputer yang sama seperti pada konfigurasi hardware atau software, kesamaan jaringan komunikasi data atau akses internet. Dalam kerja sama ini, kedua instansi setuju untuk saling mendukung bila terjadi bencana
Multiple Center	Proses sistem dan data tersebar di masing-masing unit organisasi. Strategi ini hampir sama dengan mutual aid agreement, namun dilaksanakan secara internal dalam satu organisasi atau instansi.
Out source	Organisasi melakukan kontrak dengan pihak ketiga untuk memberikan alternatif layanan proses backup.

Nama Program	Pembangunan dan Pengembangan Command Center
Deskripsi	Command Center merupakan salah satu fasilitas yang diperlukan oleh institusi/instansi dalam menjalankan <i>Crisis Management</i> atau <i>Business Continuity Management</i> . Command Center adalah sebuah lokasi lengkap dengan infrastruktur yang diperlukan, dimana seorang Kepala Daerah beserta jajarannya dapat melakukan rapat, mengambil keputusan, menugaskan, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengontrol seluruh tindakan yang diperlukan sebagai respon terhadap krisis yang dihadapi instansi, meliputi: tindakan tanggap darurat, action plan untuk perbaikan dan pemulihan, langkah pengadaaan, dan langkah penyediaan informasi publik

Spesifikasi Kebutuhan Fungsional



Standar Acuan

-

Spesifikasi Kebutuhan Teknis

Berikut adalah beberapa jenis Command Center:

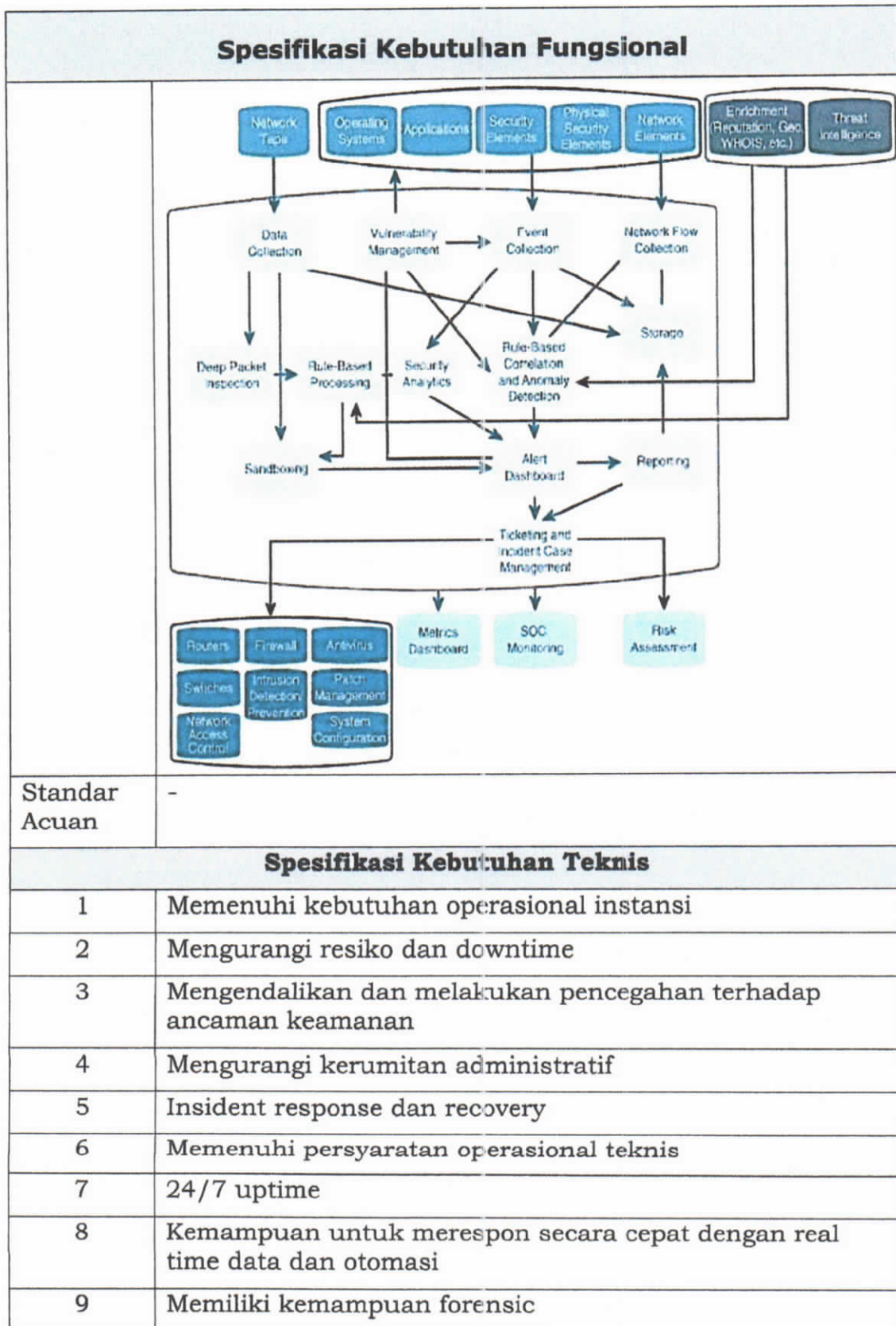
Data center management	Mengatur manajemen pusat data dan pengendalian operasi untuk sistem komputer yang sangat esensial bagi kepentingan bisnis, biasanya berbentuk pusat data dan mempunyai ruangan khusus dengan berbagai peralatan komputer canggih (super computer, mainframe, server, jaringan, dsb).
Business application management	Menjamin berbagai aplikasi yang sangat penting bagi para pelanggan dan jaringan bisnis, selalu tersedia dan bekerja sesuai desain yang ditetapkan.
Civil management	Mengatur manajemen pusat dan pengendalian fungsi-fungsi operasi sipil. Para staf selalu memonitor lingkungan metropolitan agar dapat menjamin keamanan masyarakat dan berbagai operasi sipil
Emergency (crisis) management	Menangani langsung ke masyarakat, sumber daya, dan informasi serta mengendalikan kejadian untuk mencegah suatu krisis/kondisi darurat serta meminimalisir berbagai dampak suatu kejadian/musibah.

Nama Program	Pembangunan dan Pengembangan Call Center	
<p>Deskripsi</p>	<p><i>Call Center</i> merupakan suatu infrastruktur instansi yang terpusat untuk menerima dan mengirimkan sejumlah besar permintaan melalui telepon. <i>Call center</i> di sebuah instansi pun biasanya digunakan untuk berinteraksi dengan para pelanggan. <i>Call center</i> penting untuk mencapai efisiensi sebuah bisnis, pelayanan yang lebih baik, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Pelanggan menggunakan <i>call center</i> agar dapat menghubungi pihak instansi dan mendapatkan jawaban atas pertanyaan mereka dengan cepat.</p> <p>Menurut <i>Pittsburgh Business Time</i>, pentingnya sebuah <i>call center</i> sangat bervariasi tergantung pada organisasi itu sendiri. Di industri dimana <i>customer service</i> dan volume panggilan yang tinggi adalah sesuatu yang diharapkan. <i>Call center</i> dapat menertibkan kekacauan yang terjadi. Ketika instansi mengembangkan <i>call center</i> secara efisien, maka tingkat keberhasilan yang lebih tinggi pun cenderung terjadi.</p>	
Spesifikasi Kebutuhan Fungsional		
<p>Standar Acuan</p>		
Spesifikasi Kebutuhan Teknis		

1	<p>Automatic Call Distributors dan/atau Dialers. Setiap call center memerlukan sebuah sistem untuk memroses panggilan dan interaksi lain seperti e-mail atau chat. Sebuah ACD (automatic call distributor) atau Dialers adalah inti dari sistem call center. Semua aplikasi lain dimaksudkan untuk digunakan sebagai pelengkap dan untuk mengembangkan performa dari ACD atau Dialers.</p> <p>Call center inbound menggunakan ACD untuk mengelola aliran panggilan masuk lalu mendistribusikannya ke bagian atau agen yang sesuai. Sementara call center outbound menggunakan Dialer untuk melakukan dan menyelesaikan panggilan.</p>
2	<p>CRM Application/Call Center Servicing Application adalah teknologi kedua terpenting dalam call center. Para agen menggunakan servicing application untuk dapat merespon pelanggan, menggali data, serta mencari hubungan dan nilai pelanggan bagi instansi. Kegunaan lain dari servicing application adalah untuk mendokumentasikan segala keluhan, isu, atau permintaan pelanggan, serta langkah-langkah yang dilakukan untuk menanganinya. Teknologi ini menciptakan suatu rekaman semua interaksi yang terjadi, yang bisa diakses lagi ketika diperlukan saat ada pelanggan yang memerlukan bantuan.</p>
3	<p>Campaign Management System. Call center outbound memerlukan CMS (<i>campaign management system</i>) supaya pihak penelepon bisa tahu siapa yang hendak dihubungi. Teknologi CMS yang lebih canggih bahkan memungkinkan para agen bisa merekam respon dari setiap pelanggan.</p>

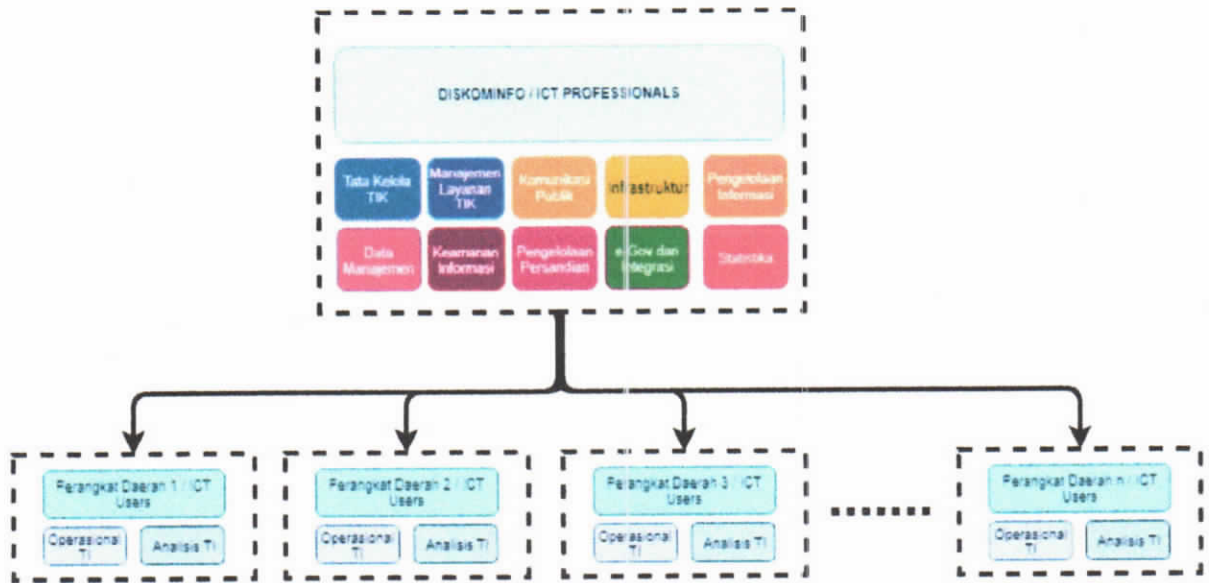
4	<p>Call Recording Systems. Semua call center untuk tujuan pelayanan dan customer service (<i>inbound</i> maupun <i>outbound</i>) memerlukan sistem recording untuk mencatat semua interaksi yang ada, supaya mereka bisa mempelajari ulang jika ada pertanyaan, masalah atau keluhan terhadap interaksi yang terjadi. Beberapa instansi hanya mempunyai catatan mengenai panggilan, tetapi beberapa mempunyai catatan lengkap baik panggilan serta skema yang digunakan untuk melayani pelanggan. Beberapa sistem pencatat yang canggih mampu mencatat semua jenis interaksi—tidak hanya panggilan.</p>
5	<p>Interactive Voice Response Systems/Speech Recognition Systems adalah alat self-service untuk mengotomatiskan penanganan panggilan masuk pelanggan. Sistem IVR (<i>interactive voice response</i>) yang lebih maju sudah menggunakan teknologi <i>speech recognition</i> supaya pelanggan bisa langsung “berbicara” dengan IVR tanpa perlu menekan tombol telepon mereka dan dioper-oper ke bagian demi bagian. Sistem IVR dan <i>speech recognition</i> bisa membantu instansi menekan biaya dan sering kali mampu menangani 40–85 persen dari semua panggilan masuk secara otomatis.</p>

Nama Program	Pembangunan dan Pengembangan Security Operation Center
Deskripsi	<p>Jaringan informasi sebagai infrastruktur jalur pertukaran informasi digital telah berkembang sedemikian pesatnya. Perkembangan ini sayangnya juga diikuti oleh penambahan jumlah ancaman terhadap keamanan jaringan tersebut. Aktivitas-aktivitas digital ilegal yang dikenal antara lain dalam bentuk serangan hacking, malware dalam bentuk virus, spyware, trojan dan lain sebagainya terus tumbuh. Selain bertumbuh dalam jumlah dan jenis, ancaman digital juga bertumbuh di sisi kualitas dan kompleksitas. Perkembangan sedemikian signifikan dari ancaman ini mengharuskan pemilik jaringan untuk dapat mulai memperhatikan metode-metode pengamanan jaringan mereka.</p> <p>Mengacu dari fakta tersebut, diperlukan solusi keamanan yang efektif dan relevan. Untuk dapat mencapai keamanan jaringan yang optimal maka diperlukan visibilitas terhadap kemungkinan serangan di segala aspek jaringan. Hal ini dapat dipenuhi oleh SOC (Security Operation Center) yang dapat melakukan korelasi antara informasi yang dikumpulkan dari berbagai solusi keamanan jaringan yang ada dan melakukan analisa terhadap incident security yang sedang terjadi.</p>



5. SDM SPBE

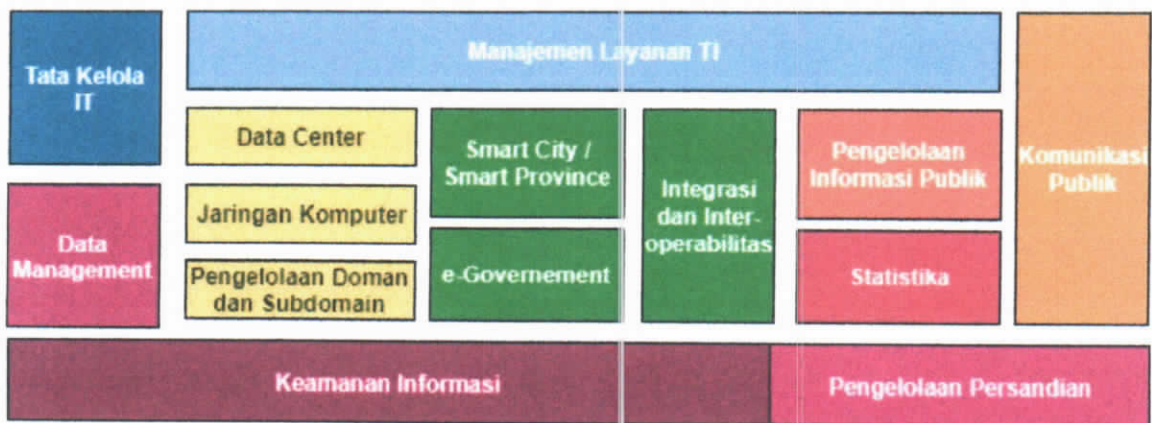
Untuk mencapai Visi dan Misi SPBE, peran leading sector pengelolaan SPBE diberikan sepenuhnya kepada Diskominfo Kabupaten Karawang. Diskominfo berperan sebagai ICT professionals yang memberikan penyusunan, pembuatan, pengelolaan, pemeliharaan, dan perbaikan layanan SPBE. Sementara PD selain Diskominfo berperan sebagai ICT users, yang aktif dalam pemanfaatan SPBE.



Gambar 16. Pemetaan SDM SPBE

Untuk mendukung peran Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai ICT professionals, maka disusun katalog tugas/fungsi SPBE yang mendukung seluruh kebutuhan SPBE namun tetap mampu mengantisipasi dinamika perubahan organisasi.

Tugas/fungsi pada katalog dikelompokkan berdasarkan area dari tugas/fungsi yang harus dilaksanakan oleh Diskominfo sebagai pengelola SPBE. Dengan acuan tugas/fungsi tidak terikat pada struktur organisasi yang dibentuk maka kebutuhan SDM SPBE dapat didefinisikan secara lebih mudah dan fleksibel.



Gambar 17. Area Fungsi SPBE

Kebutuhan SDM SPBE untuk masing-masing area fungsi ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 4. Kebutuhan SDM SPBE

No	Area Fungsi	Kebutuhan SDM SPBE
1	Tata Kelola SPBE	1. Ahli Tata Kelola SPBE 2. Ahli Rencana Strategis TI/SI 3. Ahli Enterprise Architecture 4. Ahli Manajemen SDM SPBE 5. Instruktur Pelatihan/BimTek di Bidang Tata Kelola SPBE
2	Manajemen Data	1. Ahli Arsitektur Data 2. Analis Sistem 3. Administrator Basis Data 4. Instruktur Pelatihan/Bimtek di Bidang Data Management
3	Manajemen Layanan SPBE	1. Ahli Manajemen Layanan SPBE 2. IT Service Desk 3. Administrator Sistem 4. Instruktur Pelatihan/Bimtek di Bidang Manajemen Layanan SPBE
4	Integrasi dan Interoperabilitas Sistem	1. Ahli Integrasi Sistem 2. Ahli API Programming
5	Smart City	1. Ahli e-Government / Smart City 2. Ahli Enterprise Architecture 3. Ahli Manajemen Layanan Teknologi Informasi
6	e-Government	1. Ahli e-Government 2. System Administrator 3. Software Engineer 4. Ahli Website Programming 5. Web Administrator 6. Ahli Manajemen Layanan SPBE

No	Area Fungsi	Kebutuhan SDM SPBE
7	Fungsi Data Center	1. Ahli Data Center 2. System Administrator 3. Ahli Disaster Recovery
8	Jaringan Komputer	1. Ahli Network Designer / Jaringan Komputer 2. System Administrator 3. Instruktur Pelatihan/Bimtek di Bidang Jaringan Komputer
9	Pengelolaan Domain/Subdomain	1. Sistem Administrator
10	Keamanan Informasi	1. Ahli Keamanan Informasi 2. Ahli Keamanan Jaringan 3. Administrator Jaringan 4. Ahli Audit TI/SI 5. Instruktur Pelatihan/Bimtek di Bidang Keamanan Informasi
11	Persandian	1. Ahli Persandian
12	Pengelolaan Informasi Publik	1. Analis Data dan Informasi 2. Pengelola Data dan Informasi 3. Pengadministrasi Data dan Informasi 4. Help Desk Supervisor 5. Juru Informasi dan Komunikasi
13	Komunikasi Publik	1. Ahli Komunikasi Publik 2. Analis Data dan Informasi 3. Ahli Teknologi Informasi 4. Web Administrator 5. Teknisi Produksi Multimedia dan Web 6. Ahli Komunikasi Publik 7. Ahli Community Development 8. Ahli Teknologi Informasi

No	Area Fungsi	Kebutuhan SDM SPBE
14	Statistik	1. Ahli Statistik 2. Analis Data dan Informasi 3. Surveyor

Sebagai ICT users, kebutuhan rumpun jabatan yang dibutuhkan minimal adalah rumpun jabatan analis dan operator. Rumpun jabatan analis pada masing-masing PD akan menjadi jembatan antara PD terkait dengan Diskominfo. Analis akan melakukan kegiatan pengumpulan, pengklasifikasian, dan penelaahan kebutuhan layanan SPBE untuk PD terkait, kemudian disusun laporan/kesimpulan dan rekomendasi kepada Diskominfo untuk ditindaklanjuti permintaan layanan SPBE yang dibutuhkan. Rumpun jabatan operator bertugas dalam pengoperasian layanan SPBE setiap hari di masing-masing PD.

Untuk memenuhi kebutuhan ICT professionals dan ICT users maka diperlukan proses seleksi mulai dari pengusulan pegawai yang direkomendasikan sampai dengan proses *job and competency assessment* untuk menentukan alokasi SDM SPBE. Pengisian job position juga harus benar, agar kebutuhan SDM SPBE sudah sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

BAB VIII

PETA RENCANA SPBE

Sebelum menentukan Peta Rencana SPBE Pemerintah Kabupaten Karawang, perlu dilakukan identifikasi inisiatif solusi dan analisis prioritas. Identifikasi inisiatif solusi dilakukan dengan cara melakukan konsolidasi dari hasil analisis kesenjangan dalam 5 (lima) domain yang telah dipaparkan sebelumnya, yaitu: Tata Kelola SPBE, Proses Bisnis, Sistem Informasi, Infrastruktur, dan SDM SPBE.

Hasil konsolidasi analisis kesenjangan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang, kemudian dianalisis untuk mendapatkan prioritas yang nantinya akan menentukan Peta Rencana SPBE Pemerintah Kabupaten Karawang dari tahun 2019-2021. Analisis prioritas dilakukan berdasarkan hal-hal berikut ini:

1. Arahana Strategis dari Kepala Daerah
2. Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE
3. Koordinasi dan Konsolidasi Antar PD

Berdasarkan analisis prioritas yang telah dilakukan, akhirnya diperoleh Peta Rencana SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang untuk kurun waktu 2019-2021 sebagai berikut:

Tabel 5. Peta Rencana SPBE Pemerintah Kabupaten Karawang

Kode	Program/Proyek Implementasi SPBE	Tahun		
		2019	2020	2021
TK	TATA KELOLA SPBE			
TK1	Penyusunan dan Pengesahan Kebijakan Kepemimpinan dan Kelembagaan SPBE <ul style="list-style-type: none"> - Tersusunnya Perbup tentang Tim Pengarah SPBE dan GCIO Pemerintah Kabupaten Karawang - Struktur Organisasi SPBE Pemerintah Kabupaten Karawang 			
TK2	Penyusunan Arsitektur SPBE Kabupaten Karawang <ul style="list-style-type: none"> - Tersusunnya Perbup tentang Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Karawang 			
TK3	Penyusunan dan Pengesahan Kebijakan Anggaran SPBE <ul style="list-style-type: none"> - Tersusunnya Perbup tentang Anggaran SPBE Pemerintah Kabupaten Karawang 			
TK4	Penyusunan dan Pengesahan Kebijakan Manajemen Data/Satu Data Kabupaten Karawang <ul style="list-style-type: none"> - Tersusunnya Perbup tentang Satu Data Pemerintah Kabupaten Karawang 			
TK5	Penyusunan dan Pengesahan Kebijakan Layanan/Aplikasi SPBE			

Kode	Program/Proyek Implementasi SPBE	Tahun		
	<ul style="list-style-type: none"> - Tersusunnya Perbup tentang Layanan/Aplikasi SPBE Pemerintah Kabupaten Karawang 			
TK6	Penyusunan dan Pengesahan Kebijakan Infrastruktur SPBE <ul style="list-style-type: none"> - Tersusunnya Perbup tentang Infrastruktur SPBE Pemerintah Kabupaten Karawang 			
TK7	Penyusunan dan Pengesahan Kebijakan SDM SPBE Kabupaten Karawang <ul style="list-style-type: none"> - Tersusunnya Perbup tentang SDM SPBE Kabupaten Karawang 			
TK8	Penyusunan dan Pengesahan Kebijakan dan Prosedur Manajemen Keamanan dan Risiko Informasi <ul style="list-style-type: none"> - Tersusunnya Perbup tentang Manajemen Keamanan dan Risiko Informasi Pemerintah Kabupaten Karawang - Tersusunnya SOP Manajemen Keamanan Informasi 			
TK9	Penyusunan dan Pengesahan Kebijakan dan Prosedur Pengembangan Sistem dan Teknologi Informasi <ul style="list-style-type: none"> - Tersusunnya Perbup tentang Pengembangan Sistem dan Teknologi Informasi Pemerintah Kabupaten Karawang - Tersusunnya SOP Pengembangan Sistem dan Teknologi Informasi 			
TK10	Penyusunan dan Pengesahan Kebijakan dan Prosedur Manajemen Aset SPBE <ul style="list-style-type: none"> - Tersusunnya Perbup tentang Manajemen Aset SPBE Pemerintah Kabupaten Karawang - Tersusunnya SOP Manajemen Aset SPBE 			
TK11	Penyusunan dan Pengesahan Kebijakan dan Prosedur Pemantauan dan Evaluasi Kinerja SPBE			

Kode	Program/Proyek Implementasi SPBE	Tahun		
		2019	2020	2021
	<ul style="list-style-type: none"> - Tersusunnya Perbup tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja SPBE Pemerintah Kabupaten Karawang - Tersusunnya SOP Pemantauan dan Evaluasi Kinerja SPBE 			
TK12	Evaluasi SPBE Pemerintah Kabupaten Karawang <ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya dokumen evaluasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang 			
TK13	Survei Pengguna SPBE <ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya survei pengguna SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang 			
TK14	Review Kebijakan dan Regulasi Tata Kelola SPBE <ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya dokumen review kebijakan dan regulasi Tata Kelola SPBE Pemerintah Kabupaten Karawang 			
PB	PROSES BISNIS	2019	2020	2021
PB1	Penyusunan Peta Proses Bisnis <ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya Peta Bisnis Proses pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang 			
PB2	Evaluasi Peta Proses Bisnis <ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya dokumen evaluasi peta proses bisnis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang 			
SI	SISTEM INFORMASI	2019	2020	2021
SI1	Pembangunan dan Pengembangan Portal Layanan Publik			

Kode	Program/Proyek Implementasi SPBE	Tahun		
	<ul style="list-style-type: none"> - Terbangunnya Single Sign On Layanan Publik Pemerintah Kabupaten Karawang 			
SI2	Pembangunan dan Pengembangan Portal Administrasi Layanan Pemerintahan <ul style="list-style-type: none"> - Terbangunnya Single Sign On Layanan Internal Pemerintahan (Kepegawaian, Arsip, Naskah Dinas) 			
SI3	Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi Umum Eksisting <ul style="list-style-type: none"> - Integrasi dan interoperabilitas Aplikasi Sektoral (Perencanaan, Penganggaran, Pengelolaan Keuangan, Pengelolaan Aset, Pelaporan) 			
SI4	Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Khusus Diskominfo: <ul style="list-style-type: none"> - Command Center - Satu Data - Satu Peta - Layanan Pengaduan Karawang - Data Warehouse - Business Intelligence 			
SI5	Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Khusus Fungsi Wajib Terkait Pelayanan Dasar <ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya Perizinan Terpadu Satu Pintu - Tersedianya Samsat Online - Tersedianya Puskesmas Online - Tersedianya Sistem Informasi RSUD - Tersedianya e-Education 			
SI6	Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Khusus Fungsi Wajib Tidak Terkait Pelayanan Dasar <ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya Sistem Informasi Transportasi Umum Terintegrasi 			

Kode	Program/Proyek Implementasi SPBE	Tahun		
	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya Area Traffic Control System - Tersedianya Smart Tour Plan - Tersedianya Smart Tour Transportation 			
SI7	Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Khusus Fungsi Pilihan <ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya Water Pollution Control - Tersedianya Forest Fire Detection - Tersedianya e-Komoditas - Tersedianya e-Fish Auction 			
SI8	Evaluasi Sistem Informasi <ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya dokumen evaluasi pemanfaatan sistem informasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang 			
IF	INFRASTRUKTUR SPBE	2019	2020	2021
IF1	Pembangunan dan Pengembangan Jaringan LAN dan WAN <ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya WAN Pemerintah Kabupaten Karawang 			
IF2	Pembangunan dan Pengembangan Ruang Server <ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya Ruang Server bagi seluruh aplikasi, website, dan sistem informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang - Tersedianya Storage untuk penyimpanan data bagi aplikasi, website, dan sistem informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang 			
IF3	Penyusunan Disaster Recovery Plan <ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya dokumen Disaster Recovery Plan - Tersedianya DRC bagi seluruh aplikasi, website, sistem informasi, data base di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang 			

Kode	Program/Proyek Implementasi SPBE	Tahun		
IF4	Pembangunan dan Pengembangan Command Center - Tersedianya Command Center Pemerintah Kabupaten Karawang			
IF5	Pembangunan dan Pengembangan Call Center - Tersedianya Call Center bagi masyarakat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang			
IF6	Pembangunan dan Pengembangan Video Conference - Tersedianya layanan Video Conference bagi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.			
IF7	Pembangunan Security Operation Center - Tersedianya Saranan dan Prasarana Security Operation Center dalam menangani insiden keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang			
IF8	Pemeliharaan Infrastruktur SPBE - Terpeliharanya Infrastruktur SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang			
IF9	Evaluasi Infrastruktur SPBE - Tersedianya dokumen evaluasi infrastruktur SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang			
IF10	Audit Keamanan Informasi - Terlaksananya Audit Keamanan Informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang			

Kode	Program/Proyek Implementasi SPBE	Tahun		
		2019	2020	2021
SD	SDM SPBE			
SD1	Pembinaan SDM SPBE <ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan dan Pelatihan bagi pengelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Kabupaten Karawang - Sertifikasi keahlian bagi pengelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang 			
SD2	Evaluasi jumlah dan kualifikasi SDM SPBE di seluruh PD <ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya dokumen evaluasi SDM SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang 			

BAB IX

PENUTUP

Rencana Induk SPBE Pemerintah Kabupaten Karawang disusun dengan mengacu pada arah kebijakan RPJMD Kabupaten Karawang 2016 – 2021, RPJP Nasional 2005 - 2025, Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025, dan RPJM Nasional 2014 - 2019. Pencapaian visi SPBE yang terpadu dan menyeluruh memiliki peran yang sangat penting di dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan birokrasi pemerintahan yang terpadu dan berkinerja tinggi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, dan pada akhirnya mampu mewujudkan bangsa yang berdaya saing.

Sinergi yang kuat antara Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah menjadi prasyarat untuk mencapai SPBE yang terpadu dan menyeluruh. Arah kebijakan, strategi, dan peta rencana strategis SPBE dijabarkan ke dalam 4 (empat) area, yaitu:

a. Tata Kelola SPBE

Tata Kelola SPBE diarahkan untuk perbaikan Tata Kelola SPBE dengan melakukan penguatan kapasitas pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan SPBE dan kebijakan SPBE untuk mewujudkan SPBE yang terpadu dan menyeluruh. Perbaikan tata kelola dapat dicapai melalui pembentukan tim koordinasi SPBE di tingkat nasional, di Instansi Pusat, dan di Pemerintah Daerah, pembangunan Arsitektur SPBE, penyederhanaan dan pengintegrasian proses bisnis pemerintahan, dan penyusunan kebijakan SPBE yang terpadu baik kebijakan makro, kebijakan meso, maupun kebijakan mikro SPBE.

b. Layanan SPBE

Layanan SPBE diarahkan untuk peningkatan kualitas Layanan SPBE dengan melakukan pengembangan Layanan SPBE yang berorientasi kepada pengguna, terintegrasi, dan berkesinambungan. Peningkatan kualitas Layanan SPBE dapat dicapai melalui pembangunan portal layanan publik dan portal layanan administrasi pemerintahan, integrasi Layanan SPBE, dan penerapan manajemen layanan dan teknologi layanan yang tepat guna dan tepat sasaran.

c. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Penyelenggaraan TIK diarahkan untuk pengintegrasian TIK dengan melakukan pengintegrasian data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE. TIK yang terintegrasi dapat dicapai melalui pemanfaatan Pusat Data dan jaringan pita lebar yang telah tersedia, penerapan teknologi berbagi pakai, dan penerapan manajemen data dan teknologi analitik data.

d. Sumber Daya Manusia SPBE

SDM SPBE diarahkan dengan melakukan pengembangan kepemimpinan SPBE serta peningkatan kapasitas SDM SPBE. Pengembangan SDM SPBE dapat dicapai melalui peningkatan pengetahuan dan penerapan praktik terbaik SPBE, pembangunan budaya kerja berbasis SPBE, pengembangan jabatan fungsional PNS, dan pelaksanaan kemitraan dengan berbagai pihak.

Rencana Induk SPBE Pemerintah Kabupaten Karawang selanjutnya digunakan sebagai pedoman untuk menyusun: (i) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, serta (ii) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah.

Rencana Induk SPBE Pemerintah Kabupaten Karawang yang disusun telah mencakup visi, misi, tujuan, sasaran melalui arah kebijakan, strategi, dan peta rencana strategis yang ingin dicapai dalam pembangunan SPBE sampai tahun 2021.

Rencana Induk SPBE Pemerintah Kabupaten Karawang akan diperbarui setelah ditetapkannya RPJMD Kabupaten Karawang, RPJP Nasional dan Grand Design Reformasi Birokrasi untuk periode berikutnya.

The seal of Kabupaten Karawang is circular, featuring a central Garuda emblem, a star, and the text 'KABUPATEN KARAWANG' around the perimeter.
BUPATI KARAWANG,

CELLICA NURRACHADIANA